

RENSTRA REVIEW 2018 - 2023

**Kecamatan Buahbatu
Kota Bandung**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA)- Kecamatan Buahbatu Tahun 2018-2023. Rencana Strategik (RENSTRA) Kecamatan Buahbatu tahun 2018-2023 ini merupakan dokumen Perencanaan Kecamatan untuk periode 5 (lima) tahun yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bandung 2018-2023 yang memuat Visi Kota Bandung yaitu ***“Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis”***

Rencana Strategik (RENSTRA) Kecamatan Buahbatu tahun 2018-2023 ini juga sebagai Amanah yang harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana berdasarkan Undang-undang tersebut Penyusunan RKPMD harus melalui Proses musyawarah Perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari Tingkat Kelurahan, kecamatan hingga Forum SKPD/ Gabungan SKPD.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA) Kecamatan Buahbatu Tahun 2018-2023 ini masih banyak terdapat kekurangan, kritik, masukan dan saran masih kami perlukan, mudah-mudahan dapat terus disempurnakan demi tercapainya pembangunan masyarakat khususnya di Kecamatan Buahbatu.

Bandung, Juli 2019



Drs. DENNY SANY, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19650810 198603 1 024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUAHBATU	
KOTA BANDUNG	13
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Buahbatu Kota Bandung	13
2.2 Sumber Daya Kecamatan Buahbatu Kota Bandung	16
2.2.1 Sumber Daya Manusia Kecamatan Buahbatu.....	19
2.2.2 Geografi dan Demografi Kecamatan Buahbatu.....	21
2.2.3 Potensi Pengembangan Wilayah.....	26
2.2.4 Wilayah Rawan Bencana.....	28
2.2.5 Aspek Pelayanan Umum.....	30
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Buahbatu	30
2.4 Tantangan dan Peluang Kecamatan Buahbatu	38
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT	
DAERAH	40
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	40
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	49
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	54
3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri.....	54
3.3.2 Penelaahan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2025	55
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan	

Hidup Strategis	59
3.4.1 Penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2011 2031.....	59
3.4.2 Penelaahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2005-2025.....	66
3.4.3 Penelaahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023.....	81
3.4.4 Penelaahan RPJMD Daerah Lainnya.....	87
3. 5 Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Buahbatu Kota Bandung	94
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BUAHBATU	
KOTA BANDUNG	97
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Buahbatu	97
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN BUAHBATU	
KOTA BANDUNG.....	103
5.1 Strategi Organisasi	103
5.2 Kebijakan Organisasi.....	
BAB VI RENCANA PROGRAM, RENCANA INDIKATOR KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	
6.1 Rencana, Program dan Kegiatan.....	132
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
7.1 Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Buahbatu.....	159
7.2 Persentase Kelurahan Unggul	162
7.3 Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	164
BAB VIII PENUTUP	168

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan	19
Tabel 2.2	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan	20
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Buahbatu Kota Bandung Tahun 2014-2018	33
Tabel 2.4	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Buahbatu Kota Bandung Tahun 2018	37
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Buahbatu Kota Bandung Tahun 2014-2018	48
Tabel 3.1	Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	58
Tabel 3.2	Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Buahbatu Kota Bandung dan Dinamika Lingkungan Strategis	95
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Buahbatu Kota Bandung Tahun 2018-2023	101
Tabel 4.2	Perhitungan Formulasi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Buahbatu Kota Bandung Tahun 2018-2023	102
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	131
Tabel 6.1	Alokasi Anggaran Belanja Langsung	144
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Buahbatu Kota Bandung 2019-2023	145
Tabel 7.1	Indikator kinerja Kecamatan Buahbatu yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	158



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah selama 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang disusun untuk mewujudkan target indikator kinerja daerah pada RPJMD serta target sasaran pembangunan nasional dan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja perangkat daerah dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dokumen perencanaan perangkat daerah kewilayahan Kecamatan tidak terlepas dan saling keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) khususnya pemerintah daerah kota ataupun kabupaten, hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Sebagai tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah adalah untuk upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah, kewilayahan Kecamatan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dan berperan aktif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah khususnya yang berada di kewilayahan. Kecamatan adalah bagian dari organisasi pemerintah daerah yang berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat daerah khususnya di kewilayahan sesuai dengan kewenangannya.

Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun) jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1tahun), berdasarkan hal itu setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah



(RPJPD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 277, bahwa ketentuan lebih lanjut tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD diatur dengan Peraturan Menteri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 11 menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 13 ayat (1) Permendagri 86/2017 menyatakan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Kecamatan Buahbatu Kota Bandung dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2018-2023. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra OPD.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui:



1. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain: pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta penyiapan data dan informasi perencanaan berdasarkan SIPD;
2. Tahapan penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD, mencakup antara lain: pendahuluan, gambaran pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, kinerja penyelenggara bidang urusan serta penutup;
3. Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Wali Kota tentang penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah; perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah; perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan; perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD;
4. Tahapan pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappelitbang yang dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan tujuan memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renstra Perangkat Daerah;
5. Tahapan perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan

kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan

6. Tahapan penetapan Renstra PD yang telah ditetapkan Perkada menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD.

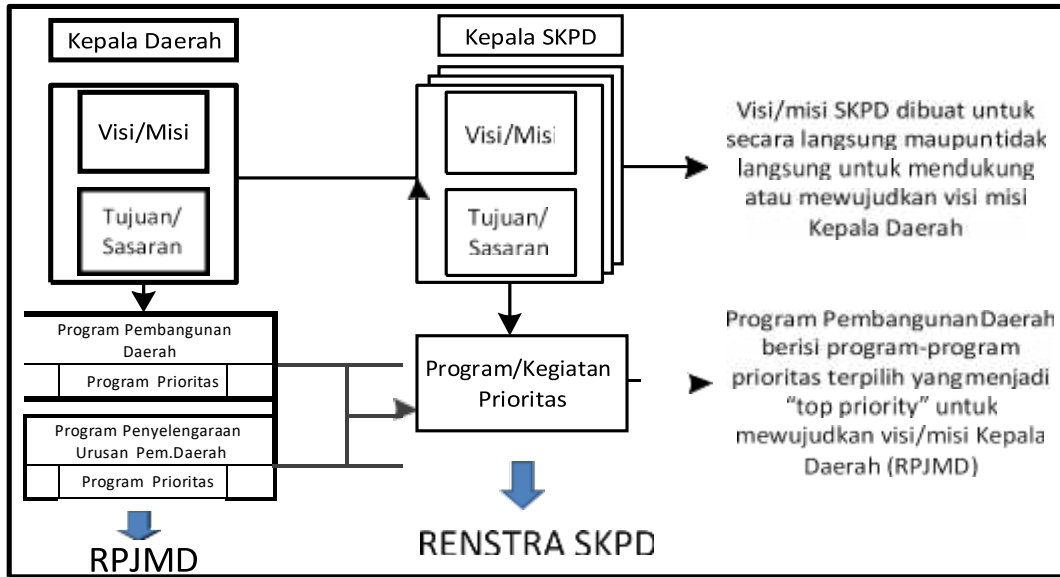
Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Buahbatu selaku kepala PD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappelitbang Kota Bandung.

RPJMD Kota Bandung dengan Renstra Perangkat Daerah

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra OPD Kecamatan Buahbatu Kota Bandung 2018-2023 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kota Bandung tahun 2018-2023 dan dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD, ilustrasi keterkaitan hubungan Renstra OPD dengan RPJMD dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1

Keterkaitan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah



Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis erasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.

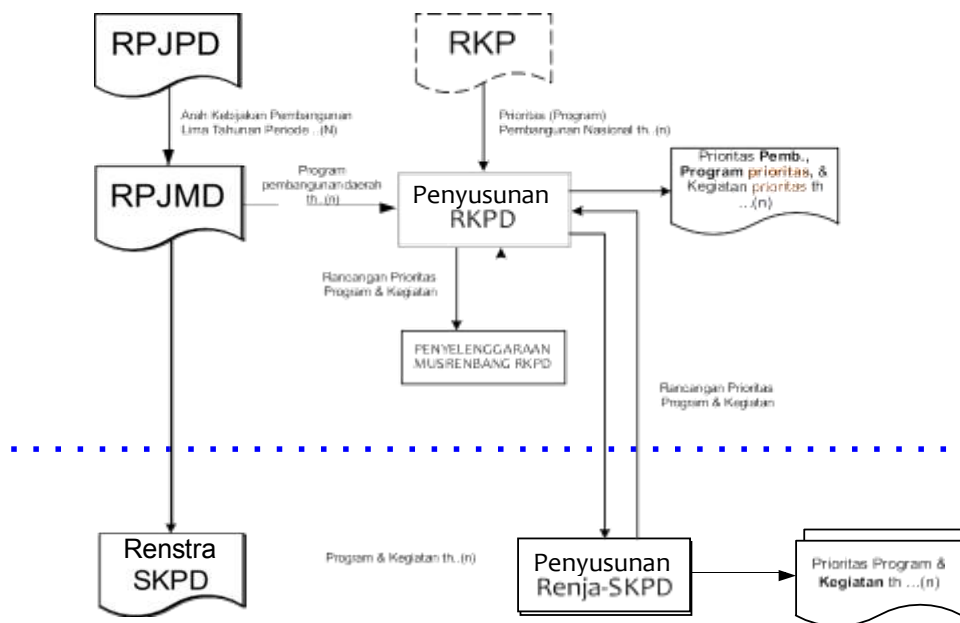
Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Visi Perangkat Daerah merupakan keadaan yang ingin diwujudkan Perangkat Daerah pada akhir periode



Renstra Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam RPJMD.

Gambar 1.2

Bagan Alur Hubungan antara Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah



RPJMD Kota Bandung dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Bandung yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Bandung yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota.

Prioritas dan sasaran pembangunan pada RKPD harus berpedoman pada RPJMD Kota Bandung, RPJMD Provinsi Jawa Barat, serta RPJM Nasional. Harus berpedoman pada RPJMD mengandung makna bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dan sejalan dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras serta sejalan dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.

Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (*milestones*) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan.

RPJMD Kota Bandung dengan Perencanaan Lainnya

Sebagai subsistem, maka berbagai dokumen perencanaan yang berkaitan dengan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 juga perlu ditelaah baik dokumen pada level nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten/Kota di cekungan Bandung, yaitu:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat;
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJMD wilayah cekungan Bandung (Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang);
5. Dokumen terkait lainnya (yang bersifat perencanaan sektoral).

Penyusunan RPJMD Kota Bandung berpedoman pada RTRW Kota

Bandung yaitu dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Kabupaten/Kota. Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional; 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Dalam menyusun RPJMD ini juga selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah, landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Buahbatu Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur,



- Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan ;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ;
 16. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan



18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No 10 Tahun 1989 tentang batas wilayah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 ;
26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 ;
27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung ;
28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018 - 2023;

29. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan

131 Maksud

Renstra Kecamatan Buahbatu Tahun 2018 - 2023 dimaksudkan sebagai peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Urusan Sosial, Urusan Pengadministrasian Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan, Urusan Pemberdayaan Kewilayahan, Urusan Pemberdayaan Kewilayahan lingkup Infrastruktur dan Lingkungan, serta Urusan Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

132 Tujuan

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Buahbatu untuk mewujudkan keselarasan antara tujuan dan sasaran daerah di bidang urusan dengan Pemerintah Kecamatan Buahbatu, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Pemerintah Kecamatan Buahbatu Kota Bandung;
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi seluruh OPD di lingkungan Kecamatan Buahbatu Kota Bandung dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Bandung, sehingga upaya pembangunan yang menjadi tanggung jawab bidang urusan yang diampu OPD Kecamatan menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Kecamatan Buahbatu Kota Bandung.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Buahbatu Kota Bandung semula disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 yang terdiri dari 8 (delapan) bab sebagai berikut:

Bab 1 : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab 2 : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUAHBATU

Gambaran pelayanan Kecamatan Buahbatu menjelaskan secara umum tentang aspek diantaranya (1) tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Buahbatu, (2) sumber daya Kecamatan Buahbatu, (3) kinerja pelayanan Kecamatan Buahbatu dan (4) tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Buahbatu.

Bab 3 : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BUAHBATU

Bab ini memuat tentang permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan di Kecamatan Buahbatu melalui identifikasi permasalahan berdasarkan Tupoksi pelayanan Kecamatan, telaahan atas visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, telaahan rencana tata

ruang wilayah dan KLHS serta penentuan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan 5 (lima) tahun mendatang.

Bab 4 : TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini menjelaskan tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Kecamatan Buahbatu selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Bab 5 : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kecamatan Buahbatu untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu juga merupakan alat untuk menilai relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan.

Bab 6 : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menjelaskan mengenai rencana program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Bab 7 : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam bab ini diuraikan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran kepala perangkat daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bab 8 : PENUTUP

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUAHBATU

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Buahbatu

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Kiaracondong mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan;
2. Pelayanan publik; dan
3. Pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan

Sedangkan uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Buahbatu Kota Bandung berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagai berikut :

Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Camat mempunyai fungsi:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
5. Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Kecamatan;
6. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang Undangan.

Sekretaris Camat

Sekretaris Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesekretariatan.

Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi

Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Camat Lingkup Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi.



 **Sub Bagian Program dan Keuangan**

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Camat lingkup program dan keuangan.

 **Seksi Pemerintahan**


Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup pemerintahan.

 **Seksi Ketenteraman dan Ketertiban**

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di lingkup ketenteraman dan ketertiban.

 **Seksi Kesejahteraan Sosial**

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Kesejahteraan Sosial.

 **Seksi Ekonomi dan Pembangunan**

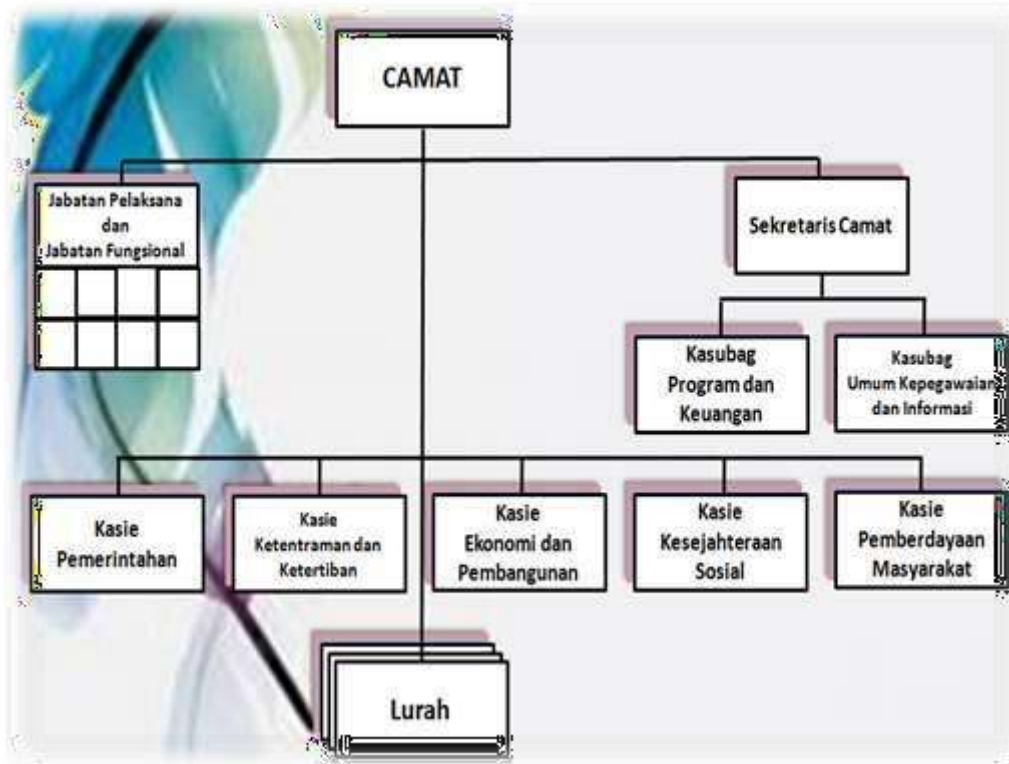
Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup ekonomi dan pembangunan.

 **Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Gambar 2.1.1

Bagan struktur organisasi Kecamatan



2.2 Sumber Daya Kecamatan Buahbatu

Kecamatan Buahbatu merupakan salah satu Kecamatan di Kota Bandung yang secara *de jure* terbentuk melalui penetapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pamekaran dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung, tetapi secara *de facto* berjalan setelah diresmikannya wilayah kerja Kecamatan Buahbatu oleh Walikota Bandung pada tanggal 20 Maret 2007 dengan batas wilayah dan jumlah Kelurahan di Kecamatan sebagai berikut:



• Utara	Kecamatan Kiaracondong dan Antapani Kota Bandung
• Selatan	Kecamatan Bojong Soang Kab. Bandung
• Barat	Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung.
• Timur	Kecamatan Rancasari Kota Bandung



Pembagian Wilayah Kecamatan Buahbatu

No.	KELURAHAN	JUMLAH	
		RW	RT
1.	Sekejati	14	94
2.	Margasari	21	152
3.	Cijaura	13	81
4.	Jatisari	7	45
Jumlah		55	372

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Buahbatu Tahun 2018

Gambar 2.2.1

Peta Kecamatan Buahbatu



2.2.1 Sumber Daya Manusia Kecamatan Buahbatu

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Buahbatu Kota Bandung memiliki pegawai sebanyak 50 orang. Dari jumlah pegawai tersebut, disamping Camat sebanyak 1 orang, Sekretaris Camat 1 orang, 20 orang (42,55%) merupakan pegawai di Kecamatan Buahbatu, Kelurahan Sekejati 6 orang (12,76%), Kelurahan Margasari 5 orang (10,63%), Kelurahan Cijaura 9 orang (19,14%), Kelurahan Jatisari 7 orang (14,89%),

Secara Geografis Kecamatan Buahbatu memiliki bentuk wilayah datar/berombak sebesar 75 % dari total keseluruhan luas wilayah. Di tinjau dari sudut ketinggian tanah, Kecamatan Buahbatu berada pada ketinggian 500m diatas permukaan air laut. Suhu maksimum dan minimum di Kecamatan Buahbatu berkisar 30 / 28 C, sedangkan di lihat dari segi hujan berkisar 600 mm/th dan jumlah hari dengan curah hujan terbanyak sebesar 45 hari

Jumlah pegawai eselon III sebanyak 2 (dua) orang yaitu Camat dan Sekretaris Kecamatan, Eselon IVa sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu 5 (lima) kepala Seksi dan 4 (empat) Lurah, Eselon IVb sebanyak 15 (lima belas) orang yaitu para kepala sub bagian pada Sekretariat Kecamatan dan Kasi pada Kelurahan. Pelaksana kecamatan sebanyak 14 orang dan Pelaksana di kelurahan sebanyak 4 (empat) orang.

Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Buahbatu, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon				Staf	Jumlah
		I	II	III	IV		
1	Kecamatan Buahbatu	-	-	2	6	14	22
2	Kelurahan Cijawura	-	-	-	3	3	6



3	Kelurahan Sekejati	-	-	-	4	3	7
4	Kelurahan Jatisari	-	-	-	5	3	8
5	Kelurahan Margasari	-	-	-	4	3	7
Jumlah		-	-	2	22	26	50

Sumber : Sekretariat Kecamatan Buahbatu Tahun 2018

Tabel 2.2

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLT A	SLT P	SD	Jml
1	Kecamatan Buahbatu	-	3	11	4	8	-	-	22
2	Kelurahan Cijawura	-	-	3	-	3	-	-	6
3	Kelurahan Sekejati	-	-	4	-	2	-	1	7
4	Kelurahan Margasari	-	-	4	-	2	1	-	7
5	Kelurahan Jatisari	-	1	5	-	2	-	-	8
JUMLAH		-	4	27	5	22	1	1	50
%		-	6,55	45,90	8,10	36,05	1,63	1,63	100,0

Sumber : Sekretariat Kecamatan Buahbatu Tahun 2018

Dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Buahbatu Kota Bandung, sebanyak 50 orang (100%) memiliki pendidikan S2 sebanyak 4 orang (6,55%), yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 27 orang (45,90%), yang memiliki pendidikan D3 sebanyak 9 orang (8,10%), yang memiliki pendidikan SLTA sebanyak 22 orang (36,05%), yang memiliki pendidikan SLTP sebanyak 1 orang (1,63%) dan pegawai yang memiliki pendidikan SD sebanyak 1 orang (1,63%).

2.2.2 Geografi dan Demografi Kecamatan Buahbatu

Gambaran Geografi yang merupakan luas wilayah Kecamatan Buahbatu beserta penggunaannya serta demografi penduduk Kecamatan Buahbatu dapat diuraikan sebagai berikut:

Geografi

Luas Wilayah	814 hektar
• Tanah Darat	795,98 hektar
• Sawah	18,00 hektar
• Kolam	0,02 hektar

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Buahbatu Tahun 2018

Demografi

Jumlah Penduduk Kecamatan Buahbatu per bulan Desember 2018, tercatat sebanyak **93.313** jiwa yang terdiri dari Laki-laki **48.440** jiwa dan Perempuan **44.873** jiwa.

No.	Pendidikan	Jumlah		
		L	P	Jumlah
1.	Belum sekolah	4.383	4.797	9.180
2.	Tidak tamat SD	2.891	2.968	5.859
3.	Tamat SD	5.161	5.017	10.178
4.	Tamat SLTP	5.223	5.260	10.483
5.	Tamat SLTA	8.046	7.046	15.092
6.	Sarjana Muda (D3)	9.220	9.182	18.402
7.	Sarjana (S1)	5.152	3.949	9.101
8.	Pasca Sarjana (S2)	8.370	6.660	15.030
9.	Pasca (S3), dll	48.446	44.879	93.325
JUMLAH		48.446	44.879	93.325



Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Buahbatu Tahun 2018

No.	Pendidikan	Jumlah		
		L	P	Jumlah
1.	Pegawai Negeri	3.822	3.394	7.216
2.	TNI/POLRI	522	328	850
3.	Pegawai Swasta	6.700	5.790	12.490
4.	Tani	702	839	1.541
5.	Dagang	2.398	2.574	4.972
6.	Pelajar	8.151	7.485	15.636
7.	Mahasiswa	4.462	5.018	9.480
8.	Pensiun	1.358	1.112	2.470
9.	Lain-lain	20.331	18.339	38.670
JUMLAH		48.446	48.446	44.879

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Buahbatu Tahun 2018

Adapun Fasilitas Umum yang terdapat di Kecamatan Buahbatu dapat diuraikan sebagai berikut :

Sarana Pendidikan

No	Sekolah	Jumlah			Ket.
		Bangunan fisik	Murid/ Mahasiswa	Guru / dosen	
1	TK	29	765	112	
2	SD	12	3.070	166	
3	SLTP	9	2.134	153	
4	SMA	13	2.870	154	
5	PT	2	20	2	
6	LEMBAGA PENDIDIKAN	3	47	12	
7	KURSUS-KURSUS	10	79	12	

Catatan : Agar diuraikan, sesuai dengan potensi yang ada di masing-masing Kecamatan

Sarana Kesehatan

No	Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Rumah Sakit		
2	Rumah Bersalin/BKIA	1 Buah	
3	Dokter Umum	40 Orang	
4	Dokter anak	4 Orang	
5	Dokter kandungan	2 Orang	
6	Dokter Gigi	2 Orang	
7	Dokter spesialis lainnya	1 Orang	
8	Dokter Hewan	1 Orang	
9	Puskesmas	2 Buah	
10	Klinik/Balai Pengobatan	15 Buah	
11	Apotik	16 Buah	
12	Toko Obat	14 Buah	
13	Posyandu	59 Buah	

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Jumlah Pos / Klinik KB	2 Buah	
2	Jumlah PUS	14350 Orang	
3	Jumlah PUS masuk KB	11807 Orang	
4	Jumlah Akseptor KB :	11807 Orang	
5	<i>PIL</i>	1548 Orang	
6	<i>IUD</i>	4396 Orang	
7	<i>KONDOM</i>	87 Orang	
8	<i>SUNTIK</i>	5419 Orang	
9	<i>MOP</i>	31 Orang	
10	<i>MOW</i>	249 Orang	
11	KB MNDIRI	9680 Orang	

Sumber : Seksi Kesjahteraan Sosial Kecamatan Buahbatu Tahun 2018

Sarana Ibadah

No	Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Mesjid	105 Buah	
2	Surau / Mushola	10 Buah	
3	Gereja	2 Buah	
4	Vihara	-	

Sumber : Seksi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Buahbatu Tahun 2018



Sarana Olahraga

No	Lapangan	Jumlah	Keterangan
1	Sepak Bola	2 Buah	
2	Bulutangkis	12 Buah	
3	Tenis Meja	352 Buah	
4	Voli	35 Buah	
5	Basket	5 Buah	
6	Tenis lapangan	5 Buah	
7	Futsal	4 Buah	

Sumber : Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Buahbatu Tahun 201

Sarana Ekonomi

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Koperasi	97 Buah	
2	UKM	502 Buah	
3	Pasar Selapan/Umum	1	
4	Usaha Perdagangan	1181 Buah	
5	Toko/Swalayan	263 Buah	
6	Warung Makan	273 Buah	
7	Restaurant	9 Buah	
8	Kios/Warung Kelontong	456 Buah	
9	Pedagang kaki Lima	120	<i>Kordon, Taman Pluto Margacinta, Cwastra & Soekarno Hatta</i>
10	Bank	5 Buah	
11	Industri Makanan	65 Buah	
12	Industri Kerajinan	11 Buah	
13	Industri Pakaian	102 Buah	
14	Perusahaan Angkutan	36 Buah	
15	Percetakan/Sablon	24 Buah	
16	Bengkel Motor/Sepeda	44 Buah	
17	Bengkel Mobil	35 Buah	

Sumber : Seksi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Buahbatu Tahun 2018



Bidang Seni dan Budaya

No	Sarana Seni dan Budaya	Jumlah
1	Sanggar Kesenian	11 buah

Sumber : Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Buahbatu Tahun 2018

Sarana Pariwisata

Uraian	Jumlah	Keterangan
Taman	47 Buah	
Tempat Pertunjukan Tradisional	-	
Toko Cenderamata/Souvenir	5 Buah	
Hotel	4 Buah	
Penginapan/Losmen	2 Buah	
Sanggar Seni	5 Buah	
Bioskop	1 Buah	

No	Lembaga Keagamaan	Jumlah
1	KUA	1 buah
2	MUI	1 buah
3	BAZ	1 buah
4	P3N	4 buah
5	KBIH	1 buah
6	LPTQ	1 buah
7	Majelis Ta'lim	85 kelompok

Sumber : Seksi Kesos Kecamatan Buahbatu Tahun 2018

2.2.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik kewilayahan, Kecamatan Buahbatu dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perdagangan dan jasa, industri kecil dan koperasi, ruang terbuka non hijau, ruang sektor informal, ruang evakuasi bencana, dan kawasan peruntukan lainnya.

a. Pengembangan penataan kawasan perdagangan dan jasa

Berdasarkan RTRW Kecamatan Buahbatu kawasan jasa meliputi kegiatan jasa keuangan, jasa pelayanan, jasa profesi, jasa perdagangan, dan, jasa pariwisata. Pengembangan penataan kawasan perdagangan terdiri atas pasar tradisional dan pusat perbelanjaan, berupa grosir, eceran aglomerasi, dan eceran tunggal/toko. Pengembangan kawasan pasar tradisional akan dilakukan di pusat kegiatan yang akan dijadikan sebagai pusat sekunder. Bentuk pasar ini dapat berupa pasar modern (*shopping mall*), ataupun pasar tradisional namun dengan penataan dan pengaturan yang ketat agar terjaga lingkungannya (sebaiknya berupa pasar tertutup/dalam gedung). Rencana pengembangan fasilitas pasar tradisional adalah sebagai berikut:

- Pembangunan kembali (*redevelopment*) kawasan Pasar Ciwastra.
- Pengaturan dan penataan pasar yang masih sesuai dengan peruntukannya dan relokasi pasar lingkungan kelurahan/kecamatan dan sekitarnya yang sudah tidak sesuai lagi peruntukannya.

b. Pengembangan kawasan industri kecil dan koperasi

Rencana pengembangan kawasan industri kecil dan koperasi adalah sebagai berikut:

- Mempertahankan industri kecil dan koperasi ramah lingkungan yang ada di lingkungan perumahan;
- Pengalihfungsian industri yang tidak ramah lingkungan menjadi kegiatan jasa dan perumahan;
- Pengembangan industri kecil yang ada di wilayah Kecamatan dapat menjadi sentra produksi yang produktif dan ramah lingkungan;

- Pengembangan koperasi dengan tujuan sebagai basis industri dalam rangka kegiatan pengembangan industri jasa dan industri perumahan.

c. Pengembangan kawasan ruang terbuka non hijau (RTNH)

Rencana pengembangan kawasan ruang terbuka non hijau, terdiri atas RTNH Publik dan RTNH Privat. RTNH publik meliputi lapangan terbuka non hijau yang dapat diakses oleh masyarakat secara bebas. RTNH privat adalah plaza milik swasta atau perorangan yang dapat diakses oleh masyarakat sesuai ketentuan yang ditetapkan.

d. Ruang sektor informal

Rencana pengembangan ruang kegiatan sektor informal di Kecamatan Buahbatu adalah sebagai berikut:

- Pembatasan ruang publik yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan sektor informal;
- Pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan PKL hanya diperbolehkan pada lokasi dan waktu sesuai dengan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan; dan
- Ketentuan lainnya yang harus diatur adalah batas gangguan yang diijinkan, ketentuan ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota, perlindungan terhadap fungsi utama ruang publik, serta keamanan dan keselamatan pengguna ruang publik.

e. Ruang evakuasi bencana

Rencana pengembangan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Buahbatu adalah sebagai berikut:

- Pengembangan taman-taman lingkungan berupa taman skala Rukun Tetangga (RT), taman skala Rukun Warga (RW), lapangan olahraga, atau ruang terbuka publik lainnya menjadi titik atau pos evakuasi skala lingkungan di kawasan perumahan;
- Pengembangan ruang evakuasi bencana gempa bumi diarahkan pemanfaatan ruang terbuka publik yang cukup besar, seperti di lapangan-lapangan olahraga, halaman/gedung sekolah, dan lain-lain sebagai ruang evakuasi skala kecamatan;

- Pengembangan ruang evakuasi bencana kebakaran diarahkan di taman-taman lingkungan skala rukun warga dan skala rukun tetangga, lapangan olahraga, atau ruang terbuka publik.

f. Kawasan peruntukan lainnya

Rencana pengembangan kawasan peruntukan lainnya di Kecamatan Buahbatu, terdiri atas kawasan keamanan dan ketertiban, pelayanan umum, kesehatan, dan kantor baru Kecamatan.

➤ Pengembangan kawasan keamanan dan ketertiban

Kondisi yang ada dari kegiatan keamanan dan ketertiban ada di Kelurahan Cijawura dimana kantor Polisi Sektor Kecamatan Buahbatu ada di wilayah tersebut dan perdekatan dengan pasar Ciwastra, perlu dipertahankan dan dikembangkan sesuai dengan tata ruang untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Buahbatu.

➤ Pengembangan /renovasi kantor Kecamatan

Kondisi yang ada kantor Kecamatan Buahbatu ke depan perlu dipertimbangkan dan di kembangkan dengan cara memperluas tata ruang sebagai instansi perkantoran yang memberikan pelayanan kepada masyarakat agar lebih representatif.

2.2.4 Wilayah Rawan Bencana

Kota Bandung berada di Cekungan Bandung yang dikelilingi oleh gunung berapi yang masih aktif dan berada di antara 3 (tiga) daerah sumber gempa bumi yang saling melingkup, yaitu (i) sumber gempa bumi Sukabumi-Padalarang-Bandung, (ii) sumber gempa bumi Bogor-Puncak-Cianjur, serta (iii) sumber gempa bumi Garut-Tasikmalaya-Ciamis. Daerah-daerah tersebut berada di sepanjang sesar-sesar aktif, sehingga sewaktu-waktu dapat terjadi gempa tektonik. Selain itu, Kota Bandung memiliki jumlah penduduk dan kepadatan yang cukup serta kerapatan bangunan yang cukup tinggi pula sehingga berisiko tinggi pada berbagai bencana yang terjadi.

Ancaman bencana geologis bagi Kota Bandung sangat besar karena dikelilingi patahan (sesar/*fault*) dari 3 (tiga) penjuru, setiap sesar menyimpan potensi kegempaan. Di utara Sesar Lembang, di barat patahan Cimandiri, dan di selatan patahan dengan jalur Baleendah dan Ciparay hingga Tanjungsari. Selain itu, dasar Cekungan Bandung memiliki tingkat sedimentasi yang tinggi sehingga akan memberikan efek yang lebih besar apabila terkena rambat gelombang gempa. Sedimentasi tertinggi terdapat di Kawasan Cibiru, Gedebage, Soekarno-Hatta, dan Tol Purbaleunyi.

Beberapa wilayah rawan bencana di Kota Bandung yang teridentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Daerah rawan banjir: di utara jalan tol Purbaleunyi dan 68 (enam puluh delapan) lokasi; terutama daerah-daerah yang dilewati oleh 5 (lima) aliran sungai, yaitu aliran sungai Cipaku, Cikapundung, Cibeunying, Cipamokolan, dan Cipadung.
2. Daerah rawan bencana gempa bumi: Bandung Kulon, Bandung Wetan, Batununggal, Bojongloa Kaler, Cicendo, Cinambo, Cobleng, Kiaracandong, Lengkong, Regol, Sukajadi, Sukasari dan Sumur Bandung.

Tabel berikut merupakan rencana penanganan kawasan bencana di Kecamatan Buahbatu.



Tabel 2.2.4

Rencana Penanganan Kawasan Bencana di Kecamatan Buahbatu Kota Bandung

No	Rencana Penanganan Kawasan Bencana	
1	Rencana penanganan rawan bencana genangan banjir.	a. Rehabilitasi dan penataan saluran drainase jalan dan aliran sungai yang dilalui. b. Membersihkan saluran drainase jalan; c. Pengendalian terhadap alih fungsi lahan; dan d. Peningkatan peresapan air melalui rekayasa teknis.
2	Rencana penanganan rawan bencana gempa bumi.	Pengendalian pembangunan pada kawasan rawan gempa bumi sesuai dengan tingkat kerentanan bencana.

2.2.5 Aspek Pelayanan Umum

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Fokus layanan urusan wajib dilakukan melalui analisis kinerja atas indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah yang menjadi pelayanan dasar masyarakat, yaitu bidang urusan pemberdayaan kewilayahan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pekerjaan umum dan penataan ruang dan sosial.

Pemberdayaan kewilayahan merupakan tingkat dukungan dan pemberdayaan masyarakat terhadap program pemerintah dalam pembangunan wilayah.

Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan peran kelembagaan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan di kewilayahan.

Pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan pemeliharaan sarana dan prasarana pekerjaan umum di lingkungan kewilayahan.

Sosial merupakan lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kewilyahan.

2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Fokus layanan urusan wajib dilakukan melalui analisis kinerja atas indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah yang menjadi pelayanan non dasar masyarakat, yaitu bidang administrasi pelayanan kependudukan dan pemerintahan.

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Buahbatu

UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *pasal 126* menyatakan bahwa Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah sebagaimana yang dimaksud Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berkaitan dengan pelimpahan kewenangan tersebut, Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 185 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah.

Urusan Camat adalah Hak dan Kewajiban Camat yang merupakan pelimpahan urusan dari Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kecamatan. Urusan Walikota yang dilimpahkan kepada Camat mencakup beberapa bidang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 08 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung.

Salah satu bidang yang menjadi urusan wajib bagi Kecamatan dan Kelurahan adalah pemberdayaan masyarakat dan desa, dimana masing-masing wilayah baik di Kecamatan dan Kelurahan diberi tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan dasar.



Atas dasar tersebut diatas Kecamatan Buahbatu dapat melaksanakan pelayanan secara prima kepada Masyarakat, diantaranya yaitu :

1. Pelayanan Perekonomian Masyarakat dilaksanakan dengan memfasilitasi Kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat seperti pembinaan UKM dan Koperasi dan pembinaan/sosialisasi peluang usaha.
2. Pelayanan peningkatan kualitas hidup masyarakat dilaksanakan dengan memfasilitasi kegiatan kemasyarakatan.
3. Pelayanan Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban dengan Pembinaan dan Pelatihan Linmas, Pembentukan SATWANKAR diwilayah Kecamatan Buahbatu dan sebagainya.
4. Pelayanan pemerintahan umum dilaksanakan dengan memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum.
5. Pelayanan umum kepada masyarakat dengan Pelayanan Prima.

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Buahbatu Kota Bandung berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2013-2018 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel berikut :



Tabel 2.3

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Buahbatu Kota Bandung
Tahun 2013-2018**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat				100	100	100	100	100	112	101	100	100	102	1,12	1,01	1,00	1,00	1,02
2	Persentase Keluhan/Pengaduan Pelayanan Administratif yang Ditindaklanjuti				100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-
3	Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Versi Ombudsman RI				100	100	100	-	-	101	111	109	-	-	1,01	1,11	1,09	-	-
4	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu				100	100	100	-	-	133	109	65	-	-	1,33	1,09	0,65	-	-
5	Persentase Waktu Pelayanan Adm. Umum Lainnya Tepat Waktu				100	100	100	-	-	109	110	109	-	-	1,09	1,10	1,09	-	-
6	Persentase Kelurahan Yang Memenuhi Standar Kriteria Baik				100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-
7	Persentase RW Juara				100	100	100	-	-	54	109	100	-	-	0,54	1,09	1,00	-	-
8	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif				100	100	100	-	-	113	130	121	-	-	1,13	1,30	1,21	-	-
9	Rasio Anggota Linmas				100	100	100	-	-	140	100	92	-	-	1,40	1,00	0,92	-	-
10	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan				-	-	-	100	100	-	-	-	106	110	-	-	-	1,06	1,10
11	Nilai AKIP Kecamatan				-	-	100	-	-	117	101	103	-	-	1,17	1,01	1,03	-	-
12	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti				100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-

Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Buahbatu

Analisis pencapaian kinerja pelayanan pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah khususnya Kecamatan sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah. Mengingat bahwa kinerja pelayanan merupakan tugas dan fungsi yang tanggung jawab Kecamatan sebagai penyelenggara pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dibutuhkan pemahaman yang baik tentang kinerja pelayanan perangkat daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

Pengukuran pencapaian kinerja pelayanan digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah Kepala Daerah.

Pencapaian kerangka kinerja pelayanan Kecamatan Buahbatu mencakup 12 (dua belas) indikator kinerja selama periode Renstra 2013 – 2018, setelah beberapa kali terjadi perubahan atas sasaran dan tujuan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kecamatan maka penetapan indikator kinerja utama disesuaikan dengan tupoksi Kecamatan. Hal ini berdampak terjadinya perubahan Renstra Revisi dan Renstra Reviu terakhir indikator kinerja menjadi 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dan Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. Indikator kinerja pelayanan Kecamatan Buahbatu terdiri atas :

- 1) Indeks Kepuasan Masyarakat secara umum hasil pencapaian setiap tahunnya meningkat. Hal ini berdampak terhadap hasil capaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Buahbatu dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat akan pelayanan yang diberikan Kecamatan. Peningkatan pencapaian kinerja pelayanan dipengaruhi nilai

tertinggi diantaranya : Kedisiplinan petugas pelayanan dalam waktu memulai aktivitas, tanggung jawab petugas pelayanan dalam melayani kepentingan dan keperluan masyarakat, keramahan dan pengetahuan petugas yang memadai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tersedianya ruang tunggu yang nyaman dimana masyarakat dapat dengan langsung mengawasi kondisi sekitarnya, dan serta terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai untuk kepentingan publik yang prima.

- 2) Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan hasil pencapaiannya meningkat pada tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan tingkat pelayanan kualitas hidup masyarakat dengan memfasilitasi kegiatan masyarakat berdampak terhadap hasil pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan.

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Buahbatu Kota Bandung, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana.

Pada tahun 2018 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Buahbatu Kota Bandung sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi
Belanja	25.202.561.059,00	24.142.897.545,00
Belanja Tidak Langsung	11.594.566.536,00	11.395.311.718,00
Belanja Langsung	13.607.994.523,00	12.747.585.827,00
Bertambah/ (Berkurang)		(860.408.696,00)

Sumber : Sekretariat Kecamatan Buahbatu (angka unaudited 2018)

Realisasi keuangan Kecamatan Buahbatu Kota Bandung pada tahun anggaran 2018 untuk belanja sebesar Rp.24.142.897.545,00 (86,85%) yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.11.395.311.718,00 (98,28%) dan belanja langsung sebesar Rp.12.747.585.827,00 (93,67%).



Untuk periode pelayanan Tahun 2013-2018 kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Buahbatu Kota Bandung, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Buahbatu Kota Bandung sebagaimana tabel berikut:



Tabel 2.4

**Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi
Pendanaan Pelayanan Kecamatan Buahbatu
Kota Bandung
Tahun 2014-2018**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- dalam ribuan (000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- dalam ribuan (000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA	10.702.645	18.610.852	20.954.804	25.968.538	25.202.561	10.334.196	17.944.772	20.515.965	25.244.754	24.142.897	0,96	0,96	0,97	0,97	0,95	0,23	0,22
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.753.445	5.473.330	6.407.393	9.994.626	11.594.566	4.551.637	5.284.558	4.279.386	9.684.248	11.395.311	0,95	0,96	0,97	0,97	0,98	0,40	0,39
BELANJA LANGSUNG	5.949.200	13.137.551	14.547.411	15.973.912	13.607.994	5.782.559	12.660.213	14.279.386	15.560.506	12.747.585	0,97	0,96	0,98	0,97	0,93	0,43	0,45

Sumber : Sekretariat Kecamatan Buahbatu (angka rekonsiliasi per Des 2018)

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Buahbatu dapat diuraikan sebagai berikut:

Tantangan

1. Belum adanya koordinasi vertikal yang baik dengan satuan kerja lain di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
2. Masih lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan Buahbatu;
3. Masih lemahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dan hukum;
4. Masih rendahnya tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat;
5. Masih tingginya angka pengangguran;
6. Masih adanya sebagian masyarakat yang masuk dalam kategori keluarga miskin;
7. Lingkungan fisik pemukiman dan non-pemukiman di Kecamatan Buahbatu belum tertata dengan baik;
8. Lembaga kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan masih belum berperan secara optimal;
9. Penyelenggaraan pelayanan belum optimal;
10. Kuantitas dan kualitas SDM yang ada di lingkungan Kecamatan Buahbatu masih perlu ditingkatkan.

Peluang

1. Penduduk Kecamatan Buahbatu memiliki tingkat partisipasi yang relatif baik;
2. Memiliki kawasan yang potensial untuk dikembangkan sebagai ruang terbuka hijau dan kawasan serapan air;
3. Wilayah Kecamatan Buahbatu yang cukup luas dan tersedia lahan untuk dikembangkannya kegiatan ekonomi;

4. Sumber daya manusia yang ada di wilayah Kecamatan Buahbatu dapat menjadi aset yang berharga bagi tingkat pertumbuhan ekonomi secara kewilayahan;
5. Kreativitas dan produktivitas masyarakat lokal cukup baik dan terus mengalami peningkatan;
6. Perkembangan pemukiman di wilayah Kecamatan Buahbatu cukup signifikan.

BAB 3

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BUAHBATU

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Buahbatu

Bab ini menguraikan isu-isu strategis yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan di Kecamatan Buahbatu yang merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Rencana Strategis untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu strategis ini diperoleh dengan cara melakukan penelaahan terhadap dokumen perencanaan lain serta mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan penyelenggaraan Program dan Kegiatan.

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan berdasarkan evaluasi capaian kinerja RPJMD Tahun 2013-2018, berdasarkan evaluasi capaian kinerja bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan mengenai berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik pada kecamatan, nilai IKM Kecamatan Tahun 2013 belum dilakukan perhitungan.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka permasalahan-permasalahan pada penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan Buahbatu dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan yaitu permasalahan pada implementasi Tataran Kebijakan, Program Kegiatan dan Teknis Operasional seperti dapat diuraikan berikut dibawah ini :

Pada tingkat implementasi tataran kebijakan pada bagian/ unit

kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Buahbatu dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tingkat pelayanan publik secara kualitas baik di Kelurahan dan Kecamatan Buahbatu belum menunjukkan secara signifikan dan maksimal. Kualitas pelayanan publik tetap akan dijadikan skala prioritas bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Buahbatu. Selain belum seluruh Kelurahan mencapai kinerja yang baik, standar pelayanan di Kecamatan Buahbatu perlu ditingkatkan lebih tinggi dan standar survei kepuasan masyarakat yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Terkait standar pelayanan publik di Kecamatan Buahbatu perlu dilakukan reviu dalam rangka perbaikan berkelanjutan, mengingat standar yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI masih berorientasi pada pemenuhan atau dimensi *tangible*. Permasalahan lainnya yang dirasakan oleh masyarakat adalah ketidaktepatan mekanisme, waktu, dan biaya layanan. Hal ini memerlukan perbaikan secara berkesinambungan.
2. Permasalahan penanganan banjir/ genangan di Kecamatan Buahbatu sangat erat kaitannya dengan optimalisasi pengelolaan drainase, dan sumber daya air. Penanganan permasalahan genangan di Kecamatan Buahbatu saat ini masih belum optimal karena di beberapa titik lokasi banjir / genangan belum dapat terselesaikan. Penyebab dari banjir / genangan adalah kurangnya kapasitas drainase primer, belum terintegrasinya saluran drainase, dan belum optimalnya kualitas saluran drainase sekunder dan tersier atas kiriman air dari wilayah atas. Permasalahan yang terkait drainase primer adalah pendangkalan sungai akibat sedimentasi dan tidak tertatanya kawasan sempadan sungai akibat pelanggaran pemanfaatan ruang, sedangkan permasalahan terkait drainase

sekunder dan tersier adalah tidak optimalnya kapasitas saluran drainase sekunder dan tersier, belum optimalnya inspeksi saluran drainase, dan desain teknis drainase yang bermasalah.

3. Peran aktif masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kecamatan Buahbatu perlu di tingkatkan dan disosialisasikan kembali melalui peran kelembagaan masyarakat di masing-masing wilayah yang ada di Kecamatan Buahbatu. Penanganan permasalahan keamanan dan kenyamanan lingkungan tidak hanya ada dipihak aparat keamanan seperti Kepolisian dan Rayon Militer, akan tetapi peran serta masyarakat dan kelembagaan yang menjadi ujung tombak di masing-masing wilayah dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Peran kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, hal ini dapat terlihat dari tingkat permasalahan sosial dan tindak pidana masih ada. Tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi di Kecamatan Buahbatu merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab tingkat kriminalitas yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat dan kenyamanan lingkungan. Peran kelembagaan masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban sangatlah penting untuk mencegah tindak pidana dan meminimalisir permasalahan sosial yang terjadi.
4. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung merupakan suatu tantangan sendiri dimana pemerintah Kota Bandung harus mengejar ketertinggalan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good governance*) dan kepatuhan (*compliance*) dimana Kecamatan Buahbatu merupakan salah

satu OPD di dalamnya.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada bagian/ unit kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Buahbatu dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Buahbatu, sebagai berikut:

1. Ruang pelayanan yang belum memadai sebanyak 4 Kelurahan karena keterbatasan anggaran untuk membangun ;
2. Kelurahan yang telah melaksanakan tertib administrasi kelurahan sebesar 90 % ;
3. Ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebesar 70 % ;
4. Belum optimalnya tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan
5. Belum optimalnya perencanaan strategis tingkat OPD ;
6. Belum optimalnya penerapan SQM ISO 9001:2015 ;
7. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah ;
8. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan ;
9. Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah ;
10. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap PBJ (metode swakelola) ;
11. Masih kurangnya kesadaran lembaga kemasyarakatan yang belum mengutamakan kepentingan masyarakat dengan masih mementingkan kebutuhan kesekretariatan, kegiatan rutinitas dan kepentingan kepengurusan sendiri ;
12. Masih banyak belum dilakukan rembuk warga ditingkat RW sebagai dasar untuk usulan PIPPK dalam musrenbang.

Pada tingkat implementasi permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Buahbatu, sebagai berikut

:

1. Kurangnya pemahaman SDM Kecamatan dan Kelurahan ;
2. Masih belum optimalnya pelaporan program dan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan kepada Pemerintah Kota Bandung ;
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan ;
4. Perencanaan kegiatan yang dilakukan PPTK masih belum berbasis kinerja sehingga masih banyak belum mendukung outcome.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Buahbatu sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang kewenangannya dilimpahkan sebagian oleh Walikota adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Buahbatu, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Buahbatu Kota Bandung antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja ;
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi ;
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja ;
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Buahbatu Kota Bandung adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap perencanaan keuangan terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang masih pemanfaatannya rutinitas, hal ini disebabkan aturan PIPPK belum secara spesifikasi ;
2. *Outcome* dari program pemberdayaan masyarakat masih

menunjukkan hasil yang belum optimal ;

3. Banyak kegiatan yang belum didukung oleh anggaran yang memadai;
4. Belum adanya koordinasi vertikal yang baik dengan satuan kerja lain di lingkungan Pemerintah Kota Bandung ;
5. Masalah utama yang dihadapi Kota Bandung adalah tidak dimilikinya fasilitas Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS). TPPAS yang digunakan saat ini merupakan TPA yang bersifat sementara dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan usia pakainya akan segera berakhir. Dengan pola pengelolaan sampah Kota Bandung yang masih bertumpu pada pola Kumpul – Angkut – Buang, maka permasalahan TPA ini akan menjadi masalah besar di kemudian hari apabila tidak segera diantisipasi. Karenanya, perubahan pola pengelolaan mutlak diperlukan, diantaranya dengan mengintensifkan pola pengelolaan sampah secara 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*);
6. Masih cukup banyak titik parkir dan PKL di badan jalan dan trotoar yang mengurangi kapasitas jalan.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Buahbatu Kota Bandung dalam kurun waktu 2018-2023, adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan

perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Barang

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai "*Pelayan Masyarakat*". Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Buahbatu dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur Kecamatan dan Kelurahan, OPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *shareholder*.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan sistem dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

Keuangan dan barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan.

Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah :

- (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan;
- (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah;
- (3) Pengamanan barang daerah;
- (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan

pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bandung Tahun 2018-2023, yaitu:

“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS”

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

Bandung : *Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bandung dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang.*

Unggul : *Dengan berbagai capaian prestasi yang telah diraih pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Bandung akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik disetiap sektor serta tetap menjadi contoh bagi daerah lain dalam bentuk terobosan bagi pembangunan daerah. Dukungan SDM Kota Bandung yang berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Bandung.*

Nyaman : *Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak terhadap lingkungan.*

Sejahtera : *Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.*

Agamis : *Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023. Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga diimplementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan.*

Dengan demikian visi Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis bermakna “*Layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur, dan layanan publik lainnya akan menghadirkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi sehari-hari, serta kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang menjadi tujuan akhir pembangunan. Sedangkan, agamis adalah perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat*”.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing
Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata.
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani
Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan prima.
3. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan
Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM local.
4. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan
Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
5. Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi
Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

Renstra Kecamatan Buahbatu berpedoman pada RPJMD Kota Bandung yang berkaitan dengan Renstra Kementerian/Lembaga/RPJMD Provinsi.

331 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 adalah "Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa".

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 yaitu Memperkuat koordinasi dan penataan administrasi kewilayahan melalui strategi :

- a. Penyusunan dan penataan regulasi administrasi kewilayahan;
- b. Peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi;
- d. Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar;
- e. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat.

Terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Kecamatan Buahbatu tidak terdapat keterkaitan secara langsung, dimana program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Buahbatu adalah mengacu pada RPJMD

Pemerintah Kota Bandung, dan merupakan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Kota Ke Kecamatan Buahbatu.

332 Penelaahan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Tema Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2020-2024 adalah:
“Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan”

1. Berpenghasilan menengah –tinggi dapat diwujudkan dengan:
 - Transformasi struktural berjalan
 - Produktifitas tenaga kerja meningkat
 - Iklim investasi kondusif
 - GNI per kapita USD 3.896 – USD 12.055
2. Sejahtera dapat diwujudkan dengan:
 - Kualitas hidup meningkat
 - Perilaku disiplin dan beradab
 - SDM berkualitas dan berdaya saing
 - Indeks kebahagiaan meningkat
3. Adil dapat diwujudkan dengan:
 - Ketimpangan menurun
 - Redistribusi berjalan baik
4. Berkesinambungan dapat diwujudkan dengan:
 - Memperhatikan daya dukung dan daya tampung (Low Carbon Development)
 - Selaras dengan agenda pembangunan global dan nasional

Arah kebijakan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020 - 2024, adalah:

1. Pembangunan manusia
 - a. Pelayanan dasar dan perlindungan sosial
 - b. SDM berkualitas dan berdaya saing

- a. Pangan dan pertanian
 - b. Energi, mineral, dan pertambangan
 - c. Kelautan dan kemaritiman
 - d. Pariwisata
 - e. Ekonomi kreatif dan digital
 - f. Industri manufaktur
3. Pembangunan infrastruktur
 4. Pembangunan politik, hukum, serta pertahanan dan keamanan
 5. Pembangunan kewilayahan

Adapun isu strategis Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia:
 - Pelayanan Dasar
 - SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2. Pembangunan ekonomi:
 - Pangan
 - Energi
 - Pariwisata, ekonomi Kreatif dan Digital
 - Industri Manufaktur Kelautan dan Kemaritiman
3. Pembangunan kewilayahan:
 - Sentra Pertumbuhan
 - Komoditas Unggulan Daerah Pertumbuhan Perkotaan
4. Pembangunan Infrastruktur:
 - Transportasi
 - Telekomunikasi
 - Sumber Daya Air Perumahan dan Pemukiman
5. Pembangunan Polhukkamhan:
 - Hukum dan Regulasi
 - Hankam
 - Politik

333 Penelaahan terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat

Penelaahan terhadap Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Barat menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi.

Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, adalah:

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut:

Jabar Juara Lahir Batin : pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin.

Inovasi : pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi : perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka

ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, yaitu :

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perwujudan visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Tata nilai tersebut hidup dan menjadi jiwa bagi masyarakat Jawa Barat. Nilai pembangunan Jawa Barat 2018-2023, meliputi:

“Relijius – Bahagia – Adil – Inovatif – Kolaboratif”

Jabar Juara dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan yang terdiri atas: Pro Perubahan; Pro Kesenjangan; Pro Ekonomi Umat dan Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah); Pro Lingkungan dan Tata Ruang; dan Pro Pembangunan Berkelanjutan. Konsep

pembangunan Jawa Barat 2018-2023 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Program unggulan gubernur dan wakil gubernur terpilih Jawa Barat merupakan hal-hal yang strategis dan untuk itu perlu dikedepankan dalam upaya mencapai visi dan misi. Program unggulan RINDU, meliputi:

1. Akses pendidikan untuk semua, meliputi:
 - a. Kelas pintar untuk semua
 - b. 1 Universitas di setiap kabupaten/kota
2. Desentralisasi pelayanan kesehatan, meliputi:
 - a. Layat rawat
 - b. Pembangunan dan perbaikan rumah sakit
 - c. Posyandu Juara
3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi, meliputi:
 - a. Ekonomi digital
 - b. Inkubator bisnis
 - c. Creative/Start-up hub
 - d. Gudang tani dan ikan Juara
 - e. Kredit 0%
4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata, meliputi:
 - a. 1 kabupaten/kota 1 destinasi wisata unggul
 - b. Infrastruktur pariwisata

- c. Pengembangam SDM pariwisata
5. Pesantren juara, meliputi:
 - a. Modernisasi dana umat
 - b. Tunjangan santri dan ulama
 - c. Modernisasi manajemen pesantren
 - d. 1 pesantren 1 produk (trenmarket)
6. Insfrastruktur konektivitas wilayah, meliputi:
 - a. 100% jalan mulus di Jawa Barat
 - b. Pembangunan dan perbaikan jalan kereta
7. Gerakan bangun desa (Gerbang desa), meliputi:
 - a. 1 desa 1 Bumdes (OVOP)
 - b. Tunjangan desa
 - c. Irigasi pertanian desa
 - d. Internet masuk desa
8. Subsidi gratis golekmah, meliputi:
 - a. Rumah gratis
 - b. Transportasi gratis
 - c. Layanan kesehatan gratis
 - d. Pendidikan gratis
 - e. Sembako gratis
9. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah, meliputi:
 - a. Provinsi pintar (E-planning budgeting, E-money, E-remunerasi kinerja, dll)
 - b. Kota/desa pintar
 - c. Pemekaran wilayah

Penetapan isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal. Dengan mengerahkan segenap potensi dan peluang serta sumber daya yang ada untuk mencari solusi bagi permasalahan dan tantangan pembangunan, diharapkan dapat ditetapkan isu strategis yang berdaya ungkit bagi pembangunan

jangka menengah Provinsi Jawa Barat. Sehingga isu strategis pada Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Barat, adalah:

1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia
2. Kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial
3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan
4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan
5. Reformasi Birokrasi

Telaahan dari RPJMN dan RPJMD Jawa Barat masih ada beberapa faktor yang menjadi menghambat dan mendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah antara lain belum terpenuhinya kebutuhan SDM yang berkualitas dan berdaya saing yang ada di tingkat kewilayahan guna meningkatkan pelayanan yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan tersedianya anggaran untuk pembangunan kewilayahan yang semakin membaik dengan harapan dapat meningkatkan inovasi pembangunan dikewilayahan sesuai kebutuhan masyarakat

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

341 Penelaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Penelaahan dilakukan terhadap

kesesuaian rencana struktur ruang, rencana pola ruang, serta rencana indikasi program pemanfaatan ruang. Dengan menelaah rencana tata ruang daerah, dapat diidentifikasi secara geografis arah pengembangan wilayah per 5 (lima) tahun dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan.

A. Rencana Struktur Ruang

Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:

- a. perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional;
- b. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan
- c. peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.

Untuk mendukung struktur ruang, rencana hirarki pusat pelayanan wilayah Kota Bandung dibagi menjadi 3 hirarki, yaitu:

- a. Pusat Pelayanan Kota (PPK) melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional;
- b. Subpusat Pelayanan Kota (SPK) yang melayani Sub wilayah Kota (SWK); dan
- c. Pusat Lingkungan (PL).

Sesuai Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2011-2031, arahan struktur ruang dibagi menjadi 8 (delapan) Subwilayah Kota (SWK) yang dilayani oleh 2 (dua) Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan 8 (delapan) Subpusat

Pelayanan Kota (SPK). Dalam RTRW Kota Bandung, PPK yang direncanakan terdiri dari PPK Alun-alun dan PPK Gedebage. PPK Alun-alun berada di bagian barat yang melayani SWK Cibeunying, Karees, Bojonegara dan Tegalega, sedangkan PPK Gedebage bagian timur melayani SWK Arcamanik, Derwati, Kordon, dan Ujungberung.

Pusat pelayanan kota minimum memiliki fasilitas skala kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi, tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya.

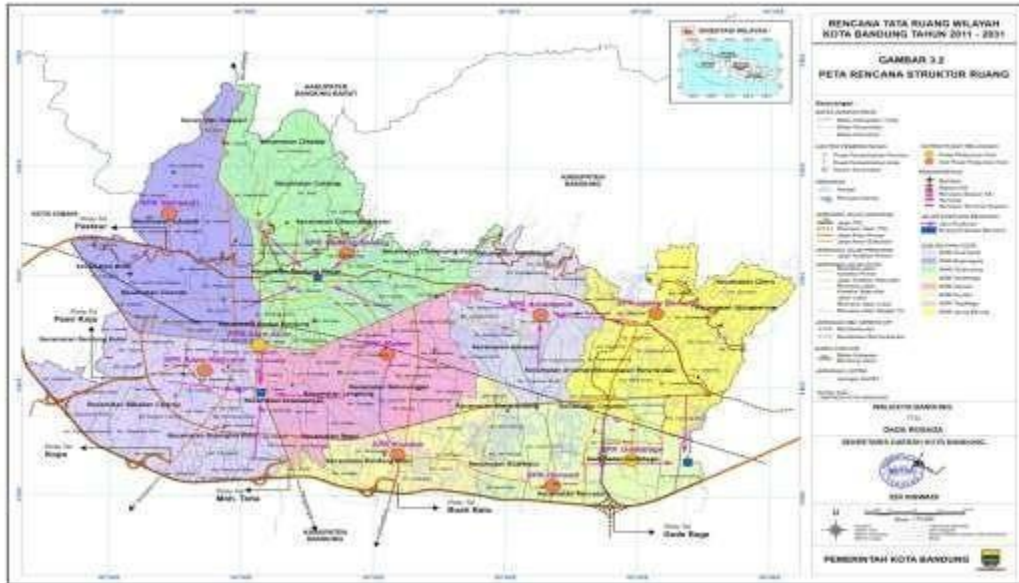
Untuk pengembangan SPK di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- a. Sub wilayah Kota Bojonagara dengan sub pusat Pelayanan Setrasari, meliputi Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir;
- b. Sub wilayah Kota Cibeunying dengan sub pusat Pelayanan Sadang Serang meliputi Kecamatan Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, Sumur Bandung, Cibeunying Kidul, Cibeunying Kaler;
- c. Sub wilayah Kota Tegallega dengan sub pusat Pelayanan Kopo Kencana, meliputi Kecamatan Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Astana Anyar;
- d. Sub wilayah Kota Karees dengan sub pusat Pelayanan Maleer, meliputi Kecamatan Regol, Lengkong, Kiaracondong, Batununggal;
- e. Sub wilayah Kota Arcamanik dengan sub pusat Pelayanan Arcamanik, meliputi Kecamatan Arcamanik, Mandalajati, Antapani;

- f. Sub wilayah Kota Ujungberung dengan sub pusat Pelayanan Ujungberung meliputi Kecamatan Cibiru, Ujungberung, Cinambo, Panyileukan;
- g. Sub wilayah Kota Kordon dengan sub pusat Pelayanan Kordon, meliputi Kecamatan Bandung Kidul, Buah; dan
- h. Sub wilayah Kota Gedebage dengan sub pusat Pelayanan Derwati, meliputi Kecamatan Gedebage, Rancasari.

SPK minimum memiliki fasilitas skala sub wilayah kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya. Kemudian Pusat Lingkungan terdiri dari pusat-pusat pelayanan pada skala kecamatan dan kelurahan. Secara lengkap, rencana struktur ruang Kota Bandung diuraikan dalam gambar berikut:

Gambar 3.4.1
Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bandung



B. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang terdiri dari pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kebijakan pola ruang dalam RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031 terdiri atas:

- a. perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung;
- b. optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

Jenis kawasan lindung yang terdapat di Kota Bandung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau (RTH), kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya. Dalam rangka perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung di

Kota Bandung, rencana yang dilakukan:

- a. menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Bandung Utara;
- b. mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;
- c. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;
- d. mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api;
- e. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;
- f. melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural;
- g. meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.

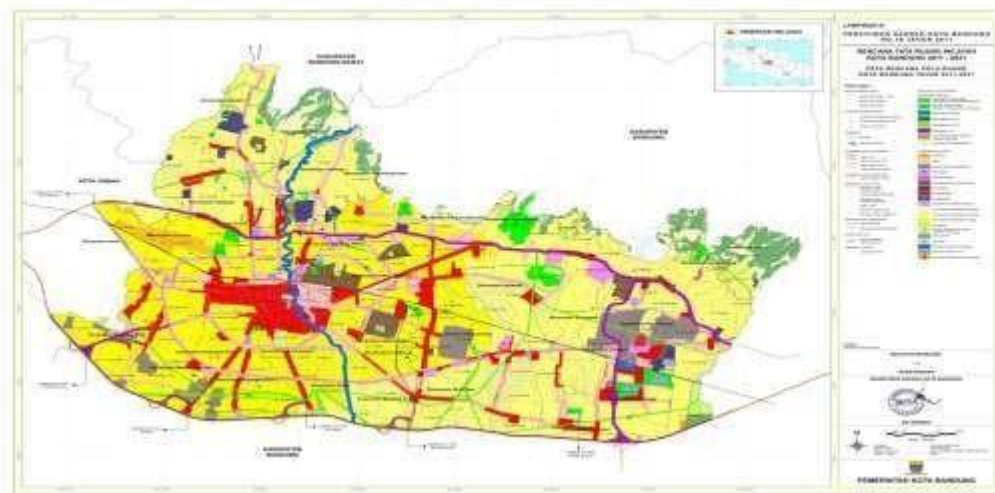
Kawasan budidaya terdiri dari atas kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri dan pergudangan, wisata buatan, ruang terbuka non hijau, ruang sektor informal, ruang evakuasi bencana, dan kawasan peruntukan lainnya. Dalam rangka pengembangan kawasan budidaya, rencana yang dilakukan meliputi:

- a. mengembangkan pola ruang kota yang kompak, intensif dan hijau, serta berorientasi pada pola jaringan

- transportasi;
- b. mendorong dan memprioritaskan pengembangan ke Bandung bagian timur yang terdiri atas SWK Arcamanik, SWK Ujung Berung, SWK Kordon, dan SWK Gedebage;
 - c. mengendalikan bagian barat kota yang telah berkembang pesat dengan kepadatan relatif tinggi, yang terdiri atas SWK Bojonagara, SWK Cibeunying, SWK Tegallega, dan SWK Karees;
 - d. membatasi pembangunan di Kawasan Bandung Utara yang berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan berfungsi lindung bagi kawasan bawahannya;
 - e. mempertahankan fungsi dan menata RTNH; dan
 - f. menata, mengendalikan dan mewajibkan penyediaan lahan dan fasilitas parkir yang memadai bagi kegiatan pada kawasan peruntukan lainnya.

Secara lengkap, rencana pola ruang Kota Bandung diuraikan dalam gambar berikut:

Gambar 3.4.2
Peta Rencana Pola Ruang Kota Bandung



342 Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Periode IV)

Penelaahan RPJPD merupakan langkah utama dalam perumusan RPJMD mengingat RPJMD merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode 5 (lima) tahunan dalam RPJPD.

RPJPD Kota Bandung 2005-2025 telah mengamanatkan target capaian pembangunan daerah Kota Bandung setiap 5 (lima) tahunan. RPJPD secara teknis telah menetapkan indikator berikut target yang harus dipenuhi pada setiap periode/tahapan. Berikut hasil telaahan RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 Periode Perencanaan Tahun 2018-2023.

Tabel 3.4.2

**Hasil Telaahan RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025
Periode Perencanaan Tahun 2018-2023**

Misi 1 RPJPD Kota Bandung “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Religius”

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap IV (Tahun 2019-2023)
1	Terkendalinya jumlah penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	IPM	poin	77,42	82,66	82,54
		Jumlah penduduk (maksimal)	jiwa	Pertumbuhan penduduk 1,59%	Pertumbuhan penduduk < 0,50%	3.068.869
		Angka fertilitas	-	2,06	1,80	1,8
2	Terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas, kreatif dan kompetitif	Indeks pendidikan	poin	89,06	94,04	93,92
		Rata-rata lama sekolah	tahun	10,34	12,38	12,33 Tahun
		Sertifikasi guru	%	< 25,00	100,00	100%
		Lembaga pendidikan di Kota Bandung yang telah menerapkan SPM	%	25,00	100,00	100%
		Angka melek huruf	%	99,26	99,80	99,78 %
3	Terwujudnya masyarakat yang sehat jasmani dan rohani	Indeks kesehatan	poin	79,27	82,16	81,87
		Angka harapan hidup	tahun	72,56	75,00	74,45
		Fasilitas kesehatan yang telah memenuhi SPM	%	70,00	100,00	90,00
		Angka kematian bayi	/1.000 kelahiran hidup	35,66	26,00	29,00
		Jumlah kematian ibu melahirkan	orang/tahun	14	10	11

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap IV (Tahun 2019-2023)
		Pemaparan zoonosis di wilayah Kota Bandung	% di wilayah Kota	Terjadinya kasus positif flu burung di 3 kelurahan	< 5,00	< 9,00
4	Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia	Tingkat pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing	-	Belum optimalnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing	Rendahnya tingkat pelanggaran terhadap norma-norma agama	Terwujudnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing
		Tingkat Kerukunan umat beragama meliputi Kerukunan antar umat beragama, Kerukunan Inter Umat Beragama, Kerukunan Antara umat beragama dengan Pemerintah	-	Belum optimalnya sikap toleransi dan kerukunan umat beragama	Terpeliharanya sikap toleransi dan kerukunan umat beragama	Terwujudnya Sikap toleransi dan Kerukunan Umat Beragama
5	Terwujudnya Kesetaraan dan keadilan Gender	Tingkat pemahaman peran kesetaraan gender dalam proses pembangunan	-	Masih rendahnya peran kesetaraan gender dalam proses pembangunan	Terwujudnya peran kesetaraan gender dalam proses pembangunan	Terwujudnya pemahaman peran kesetaraan gender dalam proses pembangunan

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap IV (Tahun 2019-2023)
		Tingkat hak-hak perlindungan perempuan dan anak	-	Masih rendahnya hak-hak perlindungan perempuan dan anak	Terlindunginya hak-hak perlindungan perempuan dan anak	Terwujudnya hak-hak perlindungan perempuan dan anak

Misi 2 RPJPD Kota Bandung “Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing”

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap IV (Tahun 2019-2023)
1	Terwujudnya perekonomian kota yang tangguh, berdaya saing serta sehat dan berkeadilan	Laju pertumbuhan ekonomi	%	7,53	> 11,00	> 11,00 %
		Tingkat pemerataan pendapatan versi Bank Dunia	%	13,34 (kategori sedang)	> 17,00 (kategori rendah)	≥ 17,00 % (kategori sedang)
		PDRB riil/kapita	Rp/thn	9.410.386	≥ 25.000.000	≥ 20.000.000
		Indeks daya beli	point	63,93	71,77	70,66
		Tingkat inflasi umum	%	19,56	< 10,00	< 10,00
		Tingkat pengangguran terbuka	%	16,25	≤ 10,00 dan dibawah rata-rata TPT Nasional dan TPT Provinsi Jabar	12,00
		Kesempatan kerja	%	84,32 (ket : total angkatan kerja masih menggunakan kriteria penduduk berusia 10 tahun keatas)	≥ 95,00	≥ 92,00
		Nilai investasi berskala nasional	Rp	3.658.612.953.405	> 5.487.919.430.107 (meningkat > 50% dari 2005)	5,122,058,134,767 (meningkat 40 % dari 2005)

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap IV (Tahun 2019-2023)
2	Terwujudnya Pariwisata yang berdaya saing	Jumlah wisatawan	orang	Wisnus : 1.928.850 Wisman : 91.350	Wisnus : ≥ 2.893.275 Wisman: ≥ 137.025 (meningkat ≥ 50% dari 2005)	Wisnus : ≥ 2,796,833 Wisman: ≥ 132,458 (meningkat 45% dari 2005)
3	Terwujudnya Kerjasama dan koordinasi yang menguntungkan dengan wilayah pemerintah Daerah lainnya	Sinergitas kegiatan ekonomi antar wilayah	-	Kerjasama antar daerah belum terealisasi secara optimal	Terwujudnya Kota Bandung sebagai pusat kegiatan pemasaran ekonomi di Priangan Timur	Meningkatnya kegiatan ekonomi antar daerah di Priangan Timur

Misi 3 RPJPD Kota Bandung “Mengembangkan Kehidupan Sosial Budaya Kota yang Kreatif, Berkesadaran Tinggi serta Berhati Nurani”

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap IV (Tahun 2019-2023)
1	Terwujudnya peningkatan mutu kerjasama di antara semua pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Bandung	akses informasi tentang pembangunan	-	Terbatasnya aksesibilitas warga terhadap informasi pembangunan; Belum tersedianya mekanisme peningkatan peran serta aktif masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi; Belum tersedianya modal sosial yang memfasilitasi antar perkumpulan warga dengan pemerintah kota	Terlibatnya masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan proses Pembangunan	Meningkatnya Peran serta aktif masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan
		Tingkat kepedulian dan kepekaan masyarakat terhadap lingkungan sosial maupun fisik	-	Rendahnya tingkat kepedulian dan kepekaan masyarakat terhadap lingkungan sosial maupun fisik	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat	Terwujudnya rasa kepedulian dan kepekaan masyarakat terhadap lingkungan sosial maupun fisik
2	Terwujudnya multikulturalisme dalam lingkungan Sunda yang inklusif	Pengembangan pusat – pusat kebudayaan	-	Terbatasnya pusat-pusat kebudayaan	Terwujudnya pusat-pusat kebudayaan sebagai sarana pelestarian pembangunan budaya sunda	Meningkatnya peran pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat dalam pembangunan dan pelestarian multikultur dalam Budaya Sunda

		Sinergitas pelestarian budaya lokal Sunda antara pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat	-	Kurangnya sinergitas pelestarian budaya lokal sunda antara pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat	Terwujudnya sinergitas pelestarian budaya lokal sunda antara pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat	Terpeliharanya hubungan pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian peninggalan budaya
--	--	---	---	---	---	--

Misi 4 RPJPD Kota Bandung “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Kota”

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap IV (Tahun 2019-2023)
1	Terwujudnya kualitas udara dan air memenuhi baku mutu	Lokasi sampel yang telah memenuhi BM kualitas udara	%	Kandungan SO ₂ dan NO _x di beberapa lokasi sampling melebihi baku mutu, sedangkan kandungan HC di semua lokasi sampling melebihi baku mutu (dari 15 lokasi sampling)	75,00	75% lokasi/sample telah memenuhi BM
2	Terjamin dan tersedianya kuantitas dan kualitas air (air permukaan, air tanah dangkal dan air tanah)	Sungai dan anak sungai di Kota Bandung yang telah memenuhi baku mutu untuk parameter BOD dan COD	%	Kandungan BOD dan COD di seluruh sungai di Kota Bandung melebihi baku mutu	20,00	20 % sungai dan anak sungai yang ada di Kota Bandung untuk parameter BOD dan COD telah memenuhi baku mutu
		Kapasitas produksi air bersih dari sumber air baku	liter/detik	± 3.750	± 6.500	Pengembangan sumber air baku dengan kapasitas produksi sebesar ± 6.120 liter/detik

 **RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**
KECAMATAN BUAHBATU KOTA BANDUNG
TAHUN 2018 - 2023

	dalam)	Ruang terbuka hijau (RTH) kota yang efektif menunjang fungsi hidroorologi (dalam bentuk taman, hutan kota, sempadan sungai,	%	± 5,72% (1.084,41 ha)	≥ 30,00% (20% RTH publik dan 10% RTH privat)	Ruang terbuka Hijau Publik yang efektif menunjang fungsi hidroorologi sebanyak 29% (dalam bentuk taman, hutan kota,
--	--------	---	---	--------------------------	--	---

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap IV (Tahun 2019-2023)
		kawasan konservasi dan RTH lainnya)				sempadan sungai, kawasan konservasi dan RTH lainnya)
3	Terwujudnya pengelolaan limbah yang efektif dan bernilai ekonomi	Reduksi dan Peningkatan pemanfaatan kembali limbah padat	-	80% sampah dapat dikelola, terdiri dari : 5% dengan 3R, dan 75% diangkut ke tempat pemrosesan akhir (TPA) (jumlah timbulan sampah 6.860 m ³ /hari)	90% sampah dapat dikelola, terdiri dari : 40% dengan 3R, dan 50% diangkut ke TPA (30% diantaranya melalui pemanfaatan teknologi yang berwawasan lingkungan & ekonomis, dan 20% landfill)	90% sampah dapat dikelola (35% reuse, reduce dan recycle, 55% ke pemrosesan akhir melalui pemanfaatan teknologi yang berwawasan lingkungan dan ekonomis 35 % , dan Landfill 20 %).
4	Tersedianya Ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan	Terbentuk struktur ruang kota	-	Terdapat 1 pusat primer (Alun-alun) dan 5 pusat wilayah pengembangan (WP)	Terbentuknya 2 pusat primer (Alun-alun dan Gedebage) dan 6 wilayah pengembangan	Minimum 80% Kawasan Pusat Primer Gedebage terbangun dan semua Pusat WP berfungsi efektif
		Pengendalian pemanfaatan ruang	-	45% bangunan tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB)	Tertibnya pemanfaatan ruang dan penggunaan bangunan	Terkendalinya pemanfaatan Ruang dan Penggunaan Bangunan

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap IV (Tahun 2019-2023)
5	Tersedianya Sistem transportasi yang selamat, efisien, nyaman, terjangkau dan ramah lingkungan	Pengembangan (sistem) prasarana transportasi yang mendukung struktur ruang kota	-	Luas jalan 2,32% dari luas wilayah kota, dan 72,10% berkondisi baik	Luas jalan minimum 5% dari luas wilayah kota (Kepmenkim-praswil No.534/KPTS/M/2001), dan 100% berkondisi baik	Luas jalan min 5 % dari wilayah kota dan 100% berkondisi baik
		Indeks aksesibilitas	km/km ² area	5,575 (indeks mobilitas 0,435 km/1.000 penduduk)	≥ 10	Indeks aksesibilitas minimum 10 km/km ² area
		Terwujudnya prasarana SAUM sesuai dengan rencana induk transportasi umum kota	%	Pelayanan angkutan umum massal belum optimal	100,00	75% dari rencana prasarana SAUM terbangun, sesuai dengan rencana induk transportasi kota
		Teratasinya aspek-aspek penyebab kemacetan (dari 32 aspek)	aspek	Teridentifikasi aspek-aspek penyebab kemacetan	32	Teratasinya Aspek-aspek penyebab kemacetan sebanyak 10 Aspek*

 **RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**
KECAMATAN BUAHBATU KOTA BANDUNG
TAHUN 2018 - 2023

6	Terwujudnya sarana dan prasarana yang memenuhi standar teknis / standar pelayanan minimal	Penduduk kota yang dilayani air bersih dengan pengaliran kontinu 24 jam	%	53,00	90,00 (standar pengaliran air 120 liter/orang/hari)	90% penduduk dilayani Air bersih dengan standar 120 liter/orang /hari dengan pengaliran air 24 jam
		Berfungsinya TPA sampah yang berkelanjutan dengan sistem pengolahan yang ekonomis	%	Belum tersedianya TPA sampah yang Berkelanjutan dengan sistem pengolahan yang ekonomis	100,00	Tempat Pemrosesan Akhir Sampah sudah berfungsi 100%.
		Penataan sistem drainase Kota yang tertata	-	Sistem drainase telah berubah karena perubahan guna lahan, penyempitan saluran, perubahan alur, dan banyaknya bangunan di atas sungai	Tertatanya sistem drainase kota yang baik dari hulu sampai hilir	Seluruh jaringan drainase kota terpadu

 **RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**
KECAMATAN BUAHBATU KOTA BANDUNG
TAHUN 2018 - 2023

		Kawasan kota yang terlayani oleh sistem penanganan air limbah yang terpadu dengan IPAL	%	Belum terintegrasinya sistem air limbah kota dengan IPAL yang memadai	100,00 (IPAL terdesentralisasi)	100% kawasan kota terlayani oleh sistem penanganan air limbah yang terpadu dengan IPAL
7	Terwujudnya mitigasi Bencana yang handal	Peningkatan pengelolaan bencana	-	Fungsi organisasi yang menangani kebencanaan belum berjalan secara optimal	Terkendalnya bencana di Kota Bandung	Tertanggulangnya bencana secara dini dan komperhensif

Misi 5 RPJPD Kota Bandung “Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota yang Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Transparan”

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap IV (Tahun 2019-2023)
1	Terwujudnya Peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan yang aspiratif, antisipatif, aplikatif, akuntabel dan berdasarkan data base	Tingkat kualitas aparatur perencana dan pengelola data		Perencanaan yang ada belum sepenuhnya aspiratif, antisipatif, aplikatif, akuntabel dan berbasis data yang akurat; Belum tersedia database secara optimal yang dapat mengakses dan diakses oleh instansi terkait	Terwujudnya perencanaan sesuai dengan aspirasi masyarakat, bersifat antisipatif, aplikatif, akuntabel berdasarkan basis data yang akurat	Terwujudnya Perencanaan sesuai dengan aspirasi masyarakat, bersifat: antisipatif, aplikatif, akuntabel berdasarkan basis data yang akurat.
2	Terwujudnya masyarakat dan aparat yang sadar hukum dan HAM	Tingkat kualitas produk hukum yang Produktif dan Implementatif		Peraturan yang ada belum sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat	Produk hukum daerah sesuai dengan kondisi dan potensi daerah	Semakin mantapnya kualitas produk hukum yang sinergi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sumber: RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025, LKPJ AMJ Wali Kota Bandung Tahun 2013-2018

343 Penelaahan RPJMD Tahun 2018-2023 (Misi 2 dan Misi 5)

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5(lima) tahun ke depan. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah. Rencana strategis perangkat daerah harus selaras dan konsisten, termasuk Kecamatan Buahbatu sebagai perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran harus selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Bandung. Keselarasan hubungan antara misi, tujuan dan sasaran serta indikator Kecamatan Buahbatu dengan indikator RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 – 2023, dapat dilihat dalam penjelasan berikut.

Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien 	2.1 Indeks Reformasi Birokrasi	2.1.1 Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	2.1.1.1 Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM Baik
			2.1.1.2 Nilai Evaluasi AKIP Kota
			2.1.1.3 Nilai LPPD Kota
			2.1.1.4 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah
			2.1.1.5 Level Kematangan <i>Smart City</i> Kota Bandung

Dalam rangka pencapaian Misi 2, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan misi, tujuan dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat di lihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi mewujudkan tatakelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih adalah terlaksanakannya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien yang dapat dilihat atau diukur dari pencapaian indek reformasi birokrasi sebagai indikator kinerjanya.

b. Sasaran

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintahan yang baik atau *Good Governance* mengandung dua pemahaman yaitu :

- Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan dalam pencapaian tujuan kemandirian daerah, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.
- Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi adalah persentasi perangkat daerah dengan nilai IKM Baik, nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau AKIP Kota Bandung, nilai LPPD Kota Bandung, Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Tabel 3.4.3

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Bandung Tahun 2018 – 2023

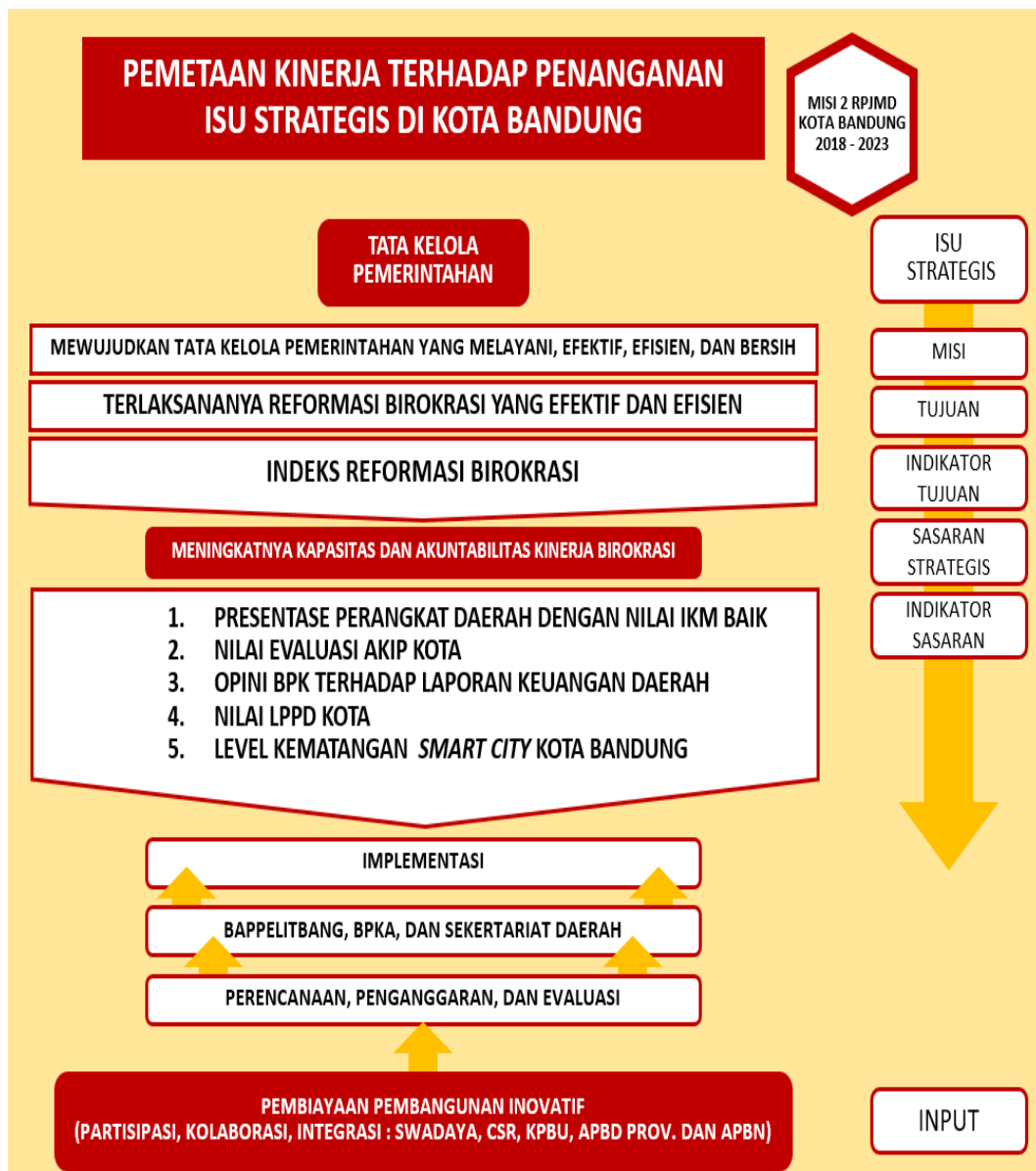
Visi 2 : Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis

No	Misi	No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2017)	Target					Kondisi Akhir
							2019	2020	2021	2022	2023	
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih	2.1	Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	69.81						70.13
		2.1.1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Indeks Kepuasan Baik	Persentase	51.61	60	70	80	90	100	100
				Nilai Evaluasi AKIP Kota	Predikat	A	A	A	A	A	A	A
				Nilai LPPD Kota	Predikat	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
				Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Predikat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Level Kematangan <i>Smart City</i> Kota Bandung	Tingkat	Integrative	Integrative	Integrative	Smart	Smart	Smart	Smart

Untuk mencapai target misi “ Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih “ diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi dalam sasaran dan programnya, yang dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar 3.4.3

Pemetaan Kinerja Misi 2



Misi 5 : Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif, dan Terintegrasi

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
5. Optimalisasi Partisipasi dan Kolaborasi dalam Pembangunan	5.1 Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dan Swasta dalam Pembangunan	5.1.1 Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dan dalam Pembangunan	5.1.1.1 Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dan dalam Pembangunan
		5.1.2 Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	5.1.2.1 Persentase Realisasi Program/Agenda Prioritas Pembangunan yang Dibiayai dari TJSJ dan Sumbangan Pihak Ketiga
			5.1.2.2 Persentase Realisasi Program/Agenda Prioritas Pembangunan yang Dibiayai dari Swasta (Akumulasi)

Dalam pencapaian Misi 5, tujuan yang ingin dicapai dalam misi mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi adalah optimalisasi partisipasi dan kolaborasi dalam pembangunan yang dapat dilihat atau diukur dari tingkat pemberdayaan kelembagaan masyarakat sebagai indikator kinerjanya dengan sasaran kegiatan dalam pemberdayaan Lingkup RW dan lingkup LKK.

344 Penelaahan RPJMD Daerah Lainnya

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang merupakan tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, luas wilayah Kota Bandung adalah seluas 16.729,65 ha. Secara administratif berbatasan dengan beberapa daerah kabupaten/kota lainnya, antara lain Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung.

Tabel 3.4.4

Identifikasi RPJMD Daerah Lain

No	Daerah Lain	Kebijakan Terkait	Keterangan
1	Kota Cimahi	Pemerataan pertumbuhan ekonomi, yang didukung sinergitas pembangunan, sumber daya unggul serta kualitas sarana prasarana yang berwawasan lingkungan, menuju masyarakat yang mandiri	Terkait dengan Kota Cimahi sebagai pendukung Kota Bandung, maka potensi terbesar Kota Cimahi adalah terjadi pergerakan regional yang melintasi Kota Cimahi dan tumbuhnya <i>second home</i> akibat pesatnya perkembangan Kota Bandung yang memerlukan tempat hunian dengan memanfaatkan lahan di sekitar Kota Cimahi. Dari hal tersebut mempengaruhi Kota Cimahi dengan tingginya permintaan tempat hunian, melihat dari terbatasnya ruang di Kota Cimahi maka untuk kebutuhan hunian diarahkan pembangunan hunian vertikal, seperti apartement, rumah susun, dan lain sebagainya.
2	Kabupaten Bandung	Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar yang terpadu dengan tata ruang wilayah serta memperhatikan aspek kebencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Sektor Transportasi dan Perhubungan Rencana sistem prasarana transportasi untuk Kabupaten Bandung berdasarkan RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027 akan diarahkan untuk menunjang struktur ruang yang akan dibentuk. Dalam konteks transportasi sebagai alat pemenuh kebutuhan wilayah, maka demand pergerakan eksisting yang mengarah ke Bandung dan Cimahi sebagai kota inti perlu ditanggulangi dengan segera. Konsep transportasi yang sesuai untuk menanggulangi permasalahan tersebut adalah dengan menyediakan sarana transportasi massal antarwilayah. • Belum terintegrasinya pembangunan infrastruktur dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan, salah satunya ditandai dengan kemacetan lalu lintas pada segmen-segmen jalan yang berbatasan dengan Kota Bandung dan Kota Cimahi merupakan ancaman dari Strategi pengembangan terkait Misi untuk mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dasar yang terpadu dengan tata ruang wilayah serta memperhatikan aspek kebencanaan
		Menciptakan pembangunan ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif	<ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan ekonomi Kota Bandung yang semakin pesat turut mempengaruhi perekonomian Kabupaten Bandung khususnya yang

No	Daerah Lain	Kebijakan Terkait	Keterangan
			berbatasan langsung, ini merupakan Strategi pengembangan terkait misi untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif
3	Kabupaten Bandung Barat	Peningkatan aksesibilitas baik antar wilayah dalam Kabupaten Bandung Barat maupun keluar daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Aksesibilitas yang baik sangat dibutuhkan untuk mendukung tumbuhnya perekonomian masyarakat, serta mendukung pelayanan publik lain di suatu daerah. Sebaliknya, sulitnya akses antara pusat pelayanan dan daerah layanannya, serta satu daerah ke daerah lain akan menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat dan juga menyulitkan masyarakat ketika akan mengakses pelayanan publik seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan. • Pengembangan PKN Metropolitan Bandung dapat dilakukan di Kota Bandung dengan strategi mengarahkan perkembangan ke Kabupaten Bandung Barat. Sesuai dengan Tujuan Pembangunan Kabupaten Bandung Barat • Kebijakan pola pemanfaatan ruang Kabupaten Bandung Barat yaitu dengan Pembatasan pengembangan kawasan, yaitu Kawasan di sekitar Kota Bandung sebagai Kawasan penyangga (bukan lagi sebagai Kawasan konservasi). Pesatnya permintaan perkembangan Kawasan terbangun dikendalikan dengan strategi pengembangan Kawasan terbangun vertikal • Strategi Penataan Ruang Makro di wilayah Kabupaten Bandung Barat ialah Peningkatan hubungan eksternal Kabupaten Bandung Barat dengan Kota Bandung sebagai pusat dari Metropolitan Bandung. Diharapkan peningkatan hubungan eksternal ini dapat mendukung peran Kabupaten Bandung Barat sebagai kawasan belakang dan menjadi kawasan produksi utama bagi Kota Bandung • Secara geografis Kabupaten Bandung Barat mempunyai potensi yang sangat besar terkait dengan fungsi dan peran Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat, dan peran Kabupaten Bandung Barat sebagai kawasan belakang Kota Bandung, hal tersebut perlu ditunjang oleh ketersediaan fasilitas yang mencukupi baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sesuai dengan strategi penataan ruang mikro wilayah kabupaten Bandung Barat

Penelaahan Rancangan KLHS

Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilaksanakan secara bersama-sama yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah. Pemerintah daerah menyusun RPJMD adalah dengan memperhatikan prinsip dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG'S) yaitu untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan. Maka dalam penyusunan RPJMD dibutuhkan KLHS sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dan sebagai bahan masukan bagi Kebijakan, Rencana, Program (KRP) dalam penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, sehingga dampak dan/atau risiko lingkungan dapat diminimalkan dengan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau resiko negatif terhadap lingkungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Aspek pembangunan berkelanjutan mengusung 4 pilar yaitu: aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan hukum serta tata kelola. Keempat pilar pembangunan tersebut dijelaskan kedalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goal's

(SDG's).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan disebutkan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030, yang mencakup 17 aspek kehidupan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015.

Dasar hukum dari KLHS RPJMD adalah Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 ini bertujuan untuk memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan 319 indikatornya, yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD, sehingga diharapkan akan terwujud pembangunan daerah yang mensejahterakan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan serta keberlangsungan lingkungan hidup.

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018, meliputi:

- A. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun
- B. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian

Berkelanjutan

- C. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
- D. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
- E. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
- F. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
- G. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk semua
- H. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
- I. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi
- J. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarneegara
- K. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
- L. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
- M. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya
- N. Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera dan Maritim
- O. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan

Keanekaragaman Hayati

- P. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan
- Q. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan dihimpun melalui masukan dan pemangku kepentingan melalui konsultasi publik untuk mengkaji capaian indikator TPB di Kota/Kabupaten. Hasil konsultasi publik memuat 14 isu/permasalahan pembangunan di Kota Bandung berdasarkan hasil penapisan, yaitu meliputi:

1. Pengelolaan sampah yang belum optimal;
2. Penurunan Kualitas Air Permukaan/Sungai akibat sampah, limbah dan sedimentasi;
3. Tingginya tingkat alih fungsi lahan dan Intensitas pemanfaatan ruang yang melebihi DDDT lingkungan;
4. Frekuensi dan Intensitas Banjir semakin tinggi disebabkan oleh rendahnya tingkat resapan jalur hijau dan kondisi drainase serta badan air;
5. Kondisi Muka Air Tanah di Kota Bandung kritis;
6. Meningkatnya resiko kebakaran dan bencana lain di Kota Bandung;
7. Tingginya tingkat kemacetan;
8. Belum terpenuhinya RTH secara kuantitas dan kualitas;
9. Belum optimalnya pengelolaan terhadap PKL di Kota Bandung;
10. Belum optimalnya pelestarian cagar budaya dan budaya local;

11. Meningkatnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran di perkotaan;
12. Belum optimalnya pengelolaan di tingkat pendidikan dasar;
13. Belum optimalnya penyediaan pelayanan kesehatan;
14. Minimnya kemitraan antara masyarakat sipil, pemerintahan dan swasta dalam mengakses pelayanan publik.

3.5 Isu-Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Buahbatu

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Buahbatu Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Bertolak dari penelaahan terhadap isu tata ruang wilayah Kota Bandung serta permasalahan pembangunan di Kota Bandung, maka ditetapkan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kecamatan Buahbatu Kota Bandung sebagai berikut:

Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Provinsi	Isu Strategis KLHS	Isu Strategis Kota Bandung	Isu Strategis Kecamatan Buahbatu
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Manusia : <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Dasar - SDM Berkualitas dan Berdaya Saing 2. Pembangunan ekonomi: <ul style="list-style-type: none"> - Pangan - Energi - Pariwisata, ekonomi Kreatif dan Digital - Industri Manufaktur Kelautan dan Kemaritiman 3. Pembangunan kewilayahan: <ul style="list-style-type: none"> - Sentra Pertumbuhan - Komoditas Unggulan Daerah Pertumbuhan Perkotaan 4. Pembangunan Infrastruktur: <ul style="list-style-type: none"> - Transportasi - Telekomunikasi - Sumber Daya Air Perumahan dan Pemukiman 5. Pembangunan Polhukkamhan : <ul style="list-style-type: none"> - Hukum dan Regulasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia 2. Kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial 3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan 4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan 5. Reformasi Birokrasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan sampah yang belum optimal 2. Penurunan Kualitas Air Permukaan/Sungai akibat sampah, limbah dan sedimentasi 3. Tingginya tingkat alih fungsi lahan dan Intensitas pemanfaatan ruang yang melebihi DDDT lingkungan 4. Frekuensi dan Intensitas Banjir semakin tinggi disebabkan oleh rendahnya tingkat resapan jalur hijau dan kondisi drainase serta badan air 5. Kondisi Muka Air Tanah di Kota Bandung kritis 6. Meningkatnya resiko kebakaran dan bencana lain di Kota Bandung 7. Tingginya tingkat kemacetan 8. Belum terpenuhinya RTH secara kuantitas dan kualitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Modal Sosial 2. Pemerataan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan 3. Peningkatan Derajat Masyarakat 4. Tata Kelola Pemerintahan 5. Ketimpangan ekonomi 6. Optimalisasi Infrastruktur dan pengendalian penataan ruang 7. Lingkungan Hidup Berkualitas dan Optimalisasi pengelolaan persampahan 8. Penanggulangan Kemiskinan dan PMKS 9. Sinergitas Pembiayaan Pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pelayanan Kewilayahan 2. Peran Kelembagaan Masyarakat 3. Optimalisasi Pemberdayaan Kewilayahan

<ul style="list-style-type: none">- Hankam- Politik		<ol style="list-style-type: none">9. Belum optimalnya pengelolaan terhadap PKL di Kota Bandung10. Belum optimalnya pelestarian cagar budaya dan budaya lokal11. Meningkatnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran di perkotaan12. Belum optimalnya pengelolaan di tingkat pendidikan dasar13. Belum optimalnya penyediaan pelayanan kesehatan14. Minimnya kemitraan antara masyarakat sipil, pemerintahan dan swasta dalam mengakses pelayanan publik		
--	--	---	--	--

BAB 4

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Buahbatu

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 pada pasal 111 menyatakan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sudah tidak mencantumkan lagi visi dan misi, sehingga pada Renstra tahun 2018 – 2023 tidak lagi mencantumkan visi dan misi, hanya menyampaikan tujuan dan sasaran.

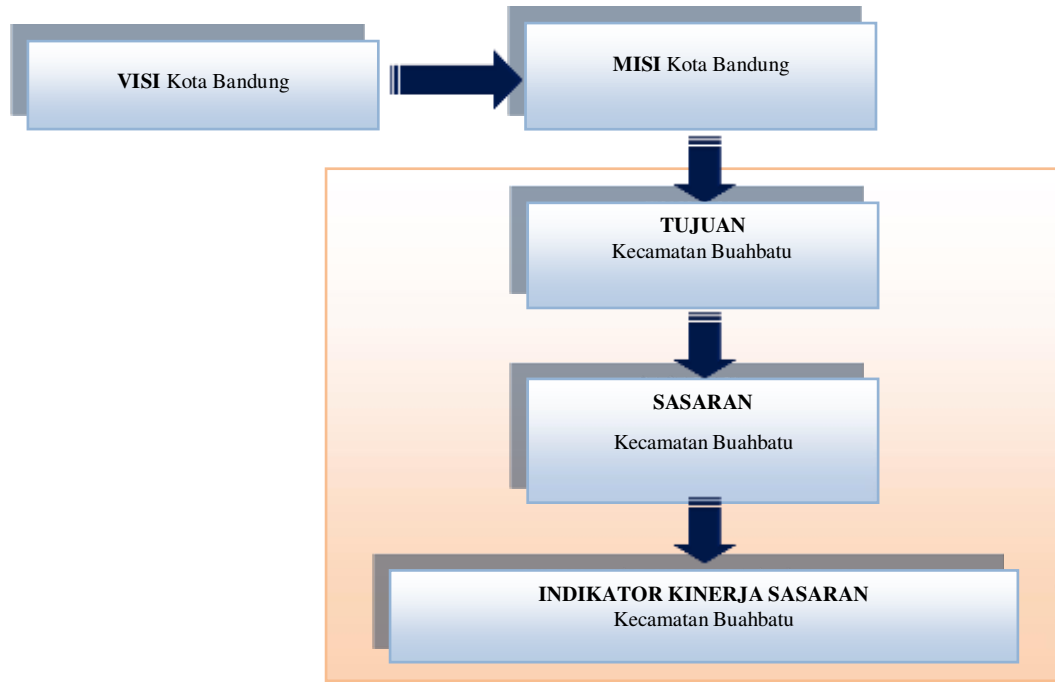
Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah.

Keselarasan hubungan antara misi, tujuan dan sasaran serta indikator RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 – 2023 dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan, dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini :

Gambar 4.1

Alur Kaitan Visi dan Misi Kota Bandung dengan Fungsi Kecamatan Buahbatu



Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Buahbatu

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi Kota Bandung yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Kecamatan Buahbatu Kota Bandung telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Kecamatan Buahbatu Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan

secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan 2 (dua) misi Kecamatan Buahbatu Kota Bandung adalah sebanyak 2 (dua) tujuan dan 3 (tiga) sasaran, tujuan dan sasaran pada masing-masing misi adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 :

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat;

Indikator Tujuan :

“Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Buahbatu”

Sasaran 1 :

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Buahbatu

Indikator Sasaran :

- Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Buahbatu
- Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu

Sasaran 2 :

Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Indikator Sasaran :

- Persentase Kelurahan Unggul

Tujuan 2 :

Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat;

Indikator Tujuan :

“Tingkat dukungan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada program pemerintah dalam pembangunan kewilayahan”

Sasaran 1 :

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

Indikator Sasaran :

- Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.

Dari dua tujuan dan tiga sasaran yang ada pada Kecamatan Buahbatu, keduanya merupakan kewenangan Kecamatan dalam pengelolaannya. Semuanya dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Kecamatan Buahbatu Tahun 2018 - 2023**

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE -				
						2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Buahbatu	1	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Buahbatu	75,00	80,00	81,00	82,00	84,00
				2	Persentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
		2	Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	3	Persentase Kelurahan Unggul	50,00 %	50,00 %	75,00 %	75,00 %	100,00 %
2	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	4	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	76,00 %	77,00 %	78,00 %	79,00 %	80,00 %

Tabel 4.2
**Perhitungan Formulasi Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Kecamatan Buahbatu Tahun 2018 - 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi Pengukuran	Rumus																										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)																										
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	1	1	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Buahbatu	Rata-rata IKM Kecamatan dan Kelurahan dengan 9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ <p>Dimana :</p> $\text{Bobot nilai rata2 tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0,111$ <p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :</p> <p>IKM Unit Pelayanan x 25</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #d3d3d3;"> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 2,59</td> <td>25,00 – 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60 – 3,05</td> <td>65,00 – 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,06 – 3,52</td> <td>76,61 – 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,53 – 4,00</td> <td>88,31 – 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	2	2,60 – 3,05	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	3	3,06 – 3,52	76,61 – 88,30	B	Baik	4	3,53 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik
			Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM		Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																							
		1	1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																									
2	2,60 – 3,05	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																											
3	3,06 – 3,52	76,61 – 88,30	B	Baik																											
4	3,53 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																											
2	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	Persentase temuan yang ditindaklanjuti terhadap jumlah temuan	$\frac{\text{Jumlah temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan}} \times 100 \%$																												
2	Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	3	Persentase Kelurahan Unggul	% Kelurahan yang memenuhi kriteria Kelurahan Unggul	$\frac{\text{Kelurahan yang memenuhi kriteria Kelurahan Unggul}}{\text{Jumlah Kelurahan}} \times 100$																										
2	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	4	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	$\frac{\text{Rata2 \% RW Unggul} + \text{Rata2 \% PKK Unggul} + \text{Rata2 \% Karang Taruna Unggul} + \text{Rata2 \% LPM Unggul}}{\text{Jumlah Kelurahan}} \times 100$																									
2	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	4	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	$\frac{\text{Rata2 \% RW Unggul} + \text{Rata2 \% PKK Unggul} + \text{Rata2 \% Karang Taruna Unggul} + \text{Rata2 \% LPM Unggul}}{\text{Jumlah Kelurahan}} \times 100$																									

BAB 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Organisasi

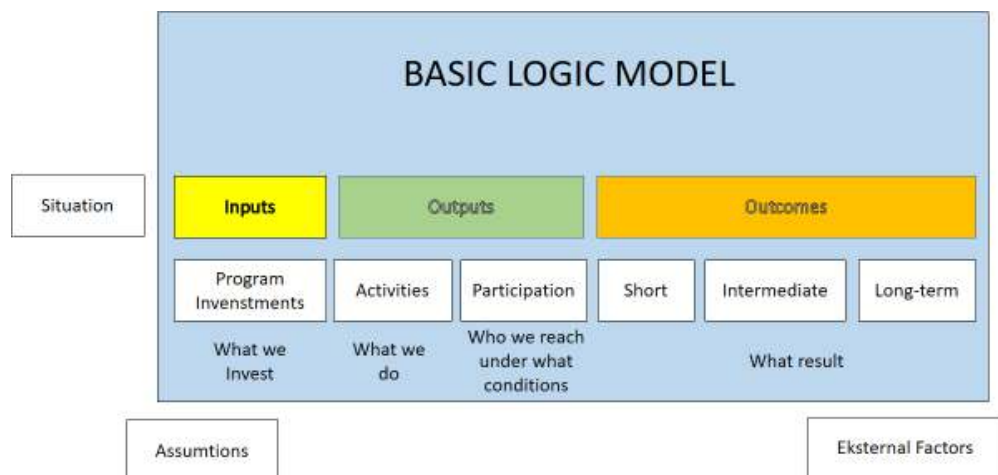
Strategi adalah rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan merupakan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam menunjang keberhasilan misi pembangunan daerah Kota Bandung yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan perangkat daerah sehingga dapat memberikan gambaran pelayan kepada masyarakat.

Dengan *grand design* perencanaan yang baik dapat menjawab suatu permasalahan baik yang sudah terjadi, sedang terjadi dan yang akan terjadi. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan di kewilayahan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya dan merupakan salah satu rujukan penting dalam perencanaan perangkat daerah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Kecamatan Buahbatu tahun 2018 – 2023 yaitu analisis Logic Model. Logic Model adalah alat yang

menyampaikan skema, program, atau proyek singkat, format yang visual. Model logika ini menjelaskan tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. Sebuah model adalah gambaran pemikiran saat individu atau kelompok tentang bagaimana ide atau program mereka mungkin bekerja. Logic model membantu penyusunan desain, perencanaan, pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk monitoring, dan evaluasi pada level pemerintah Kota Bandung.

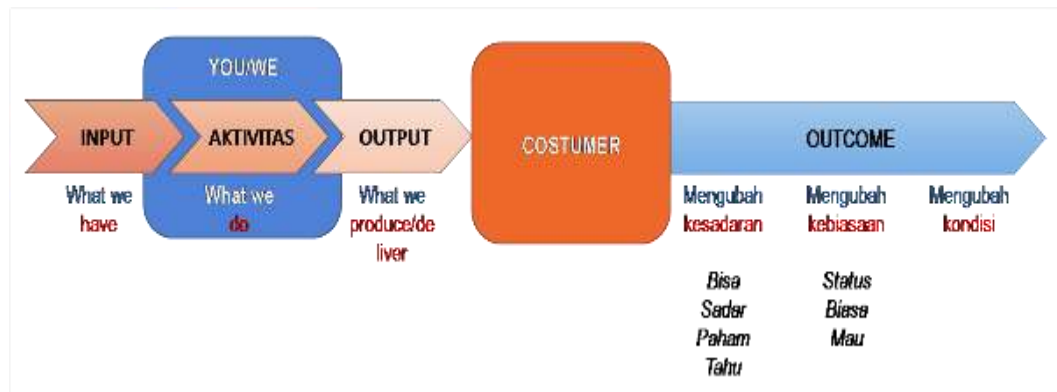
Model ini dapat diuji untuk kelayakan, dan lebih detailnya dapat menyelaraskan dengan kegiatan, sumber daya, output pada urusan teknis atau Perangkat Daerah. Hubungan antara unsur-unsur, baik interaksi relatif dan urutan berdasarkan hubungan sebab akibat (klausal), serta dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana aksi pemerintah kota maupun pada Perangkat Daerah.



Pendekatan logic model dalam bidang perencanaan dan penganggaran digunakan untuk menyajikan kerangka perencanaan yang menjembatani gap antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan/diharapkan sehingga dapat dikatakan efektif dan efisien penggunaannya. Pendekatan logic model melihat keterkaitan antara

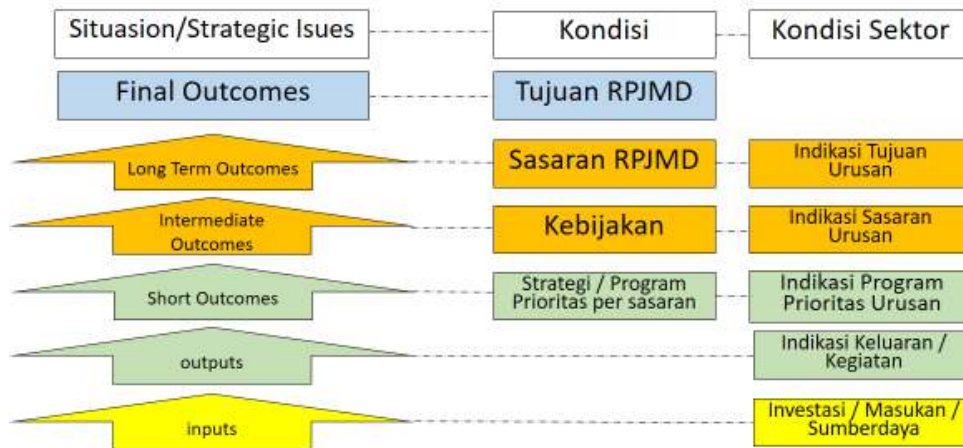
Hasil/Outcome, Keluaran/Output, Aktivitas, dan Input terhadap Customer yang dituju melalui suatu program.

Konsep Dasar Pendekatan *logic model*



Mekanisme penyusunan informasi kinerja dalam pendekatan *logic model* dilakukan dari level paling atas (*Outcome*) dan diikuti dengan informasi/referensi *Output*, *Aktivitas*, dan *Input* yang digunakan (*Top Down Mechanism*). *Outcome* dan *Output* yang disusun harus berorientasi keluar kepada *Customer (external perspective)* bukan kepada internal suatu organisasi (K/L). Melalui pendekatan *logic model*, secara otomatis akan memberikan dampak perubahan struktur informasi kinerja, semula arsitektur kinerja disusun berdasarkan struktur organisasi menjadi berdasarkan fungsi organisasi berbasis pada Hasil/*Outcome*.

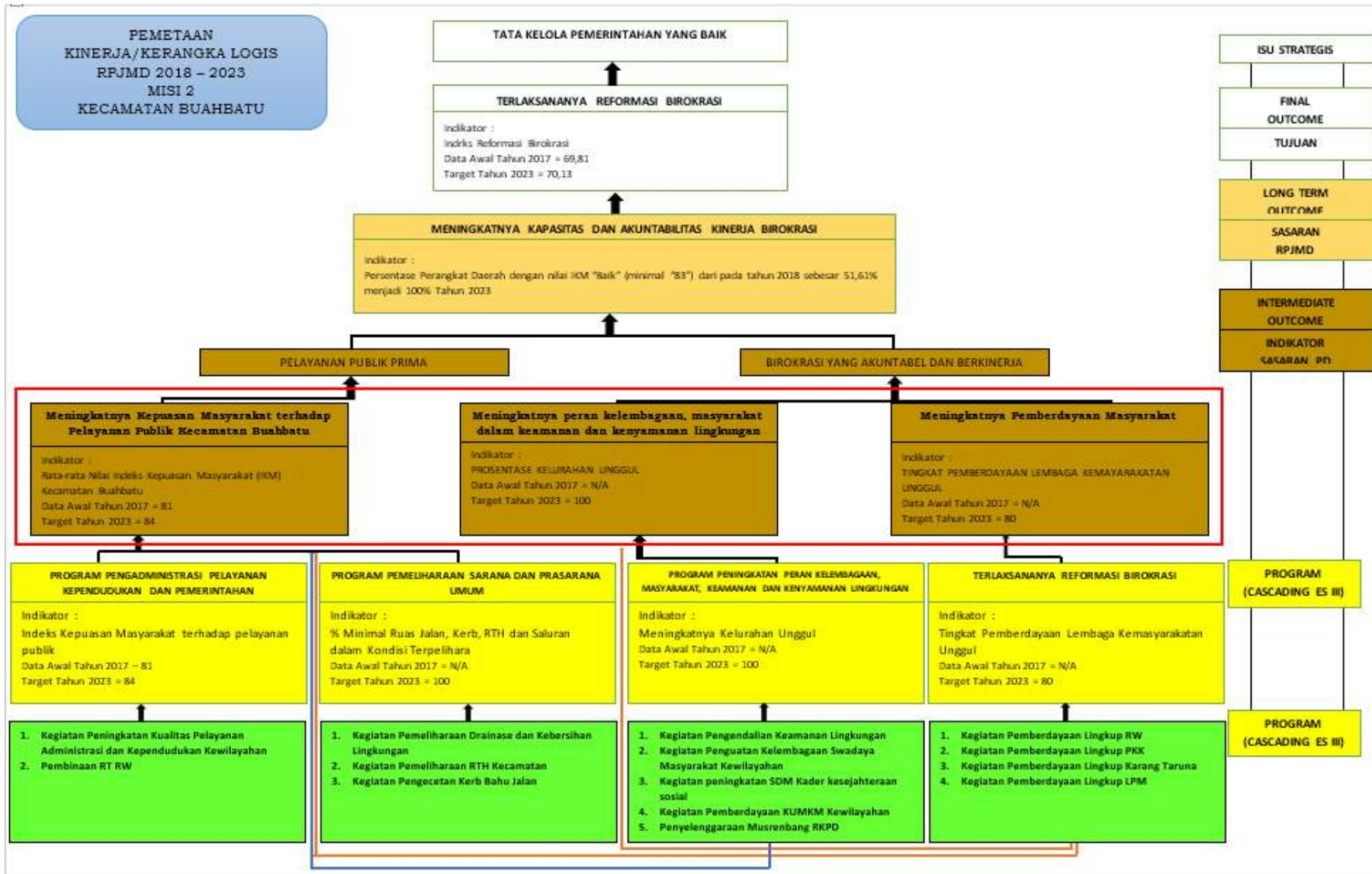
Struktur dan Padanan Logic Model
 Dalam dokumen RPJMD dan Renstra PD



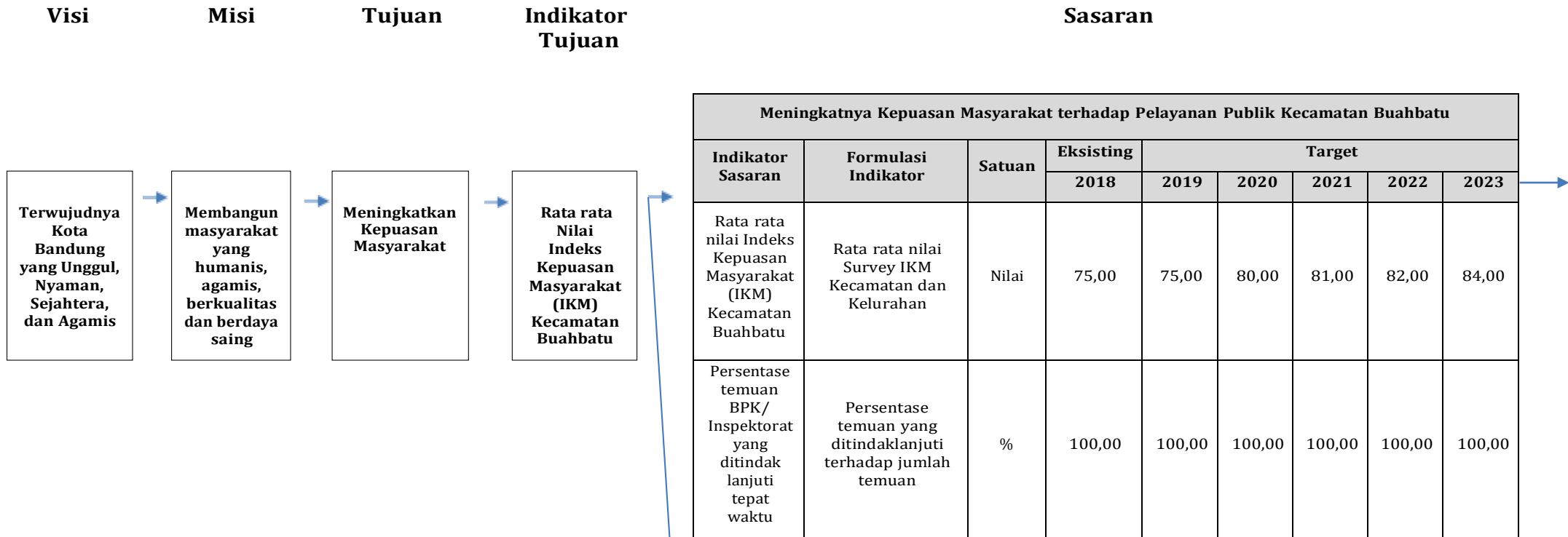
Manfaat logic model :

1. Membantu penyusunan desain, perencanaan dan pengembangan strategi dan kebijakan secara komprehensif/ lintas sector (sesuai kebutuhan) pada level Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat daerah serta Cascading pada eselon 3 dan 4

**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN BUAHBATU KOTA BANDUNG
TAHUN 2018 - 2023**



Cascading Kinerja Kecamatan Buahbatu Kota Bandung :



Sasaran

Program Prioritas

Program Peningkatan Peran Kelembagaan, Masyarakat, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan									
Sasaran Program	Indikator Program	Formulasi Indikator	Satuan	Eksisting	Target				
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rata rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Buahbatu	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Hasil survey rata-rata nilai IKM Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	75,00	75,00	80,00	81,00	82,00	84,00

Program Prioritas

Kegiatan

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan								
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan/Output	Satuan	Eksisting	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Daftar nominatif pelayanan lengkap	%	100	100	100	100	100	100

Kegiatan Pembinaan RT RW								
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan/Output	Satuan	Eksisting	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Jumlah RT RW mendapatkan pembinaan	RW	55	55	55	55	55	55

Indikator Tujuan

Sasaran

Program Prioritas

Nilai Rata rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Buahbatu

Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan								
Indikator Sasaran	Formulasi Indikator	Satuan	Eksisting	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Kelurahan Unggul	% kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan unggul terhadap jumlah kelurahan	%	N/A	50,00	50,00	75,00	75,00	100,00

Sasaran

Program Prioritas

Kegiatan

Program Peningkatan Peran Kelembagaan, Masyarakat, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan									
Sasaran Program	Indikator Program	Formulasi Indikator	Satuan	Eksisting	Target				
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Kelurahan Unggul	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase rata-rata nilai kegiatan peran kelembagaan masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	N/A	N/A	75,00	76,00	77,00	78,00

Program Prioritas

Kegiatan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan								
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan/Output	Satuan	Eksisting	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	RW	N/A	N/A	50	60	70	80

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan								
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan/Output	Satuan	Eksisting	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Kader pemberdayaan kewilayahan Aktif	Orang	N/A	N/A	96	102	108	120

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial								
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan/Output	Satuan	Eksisting	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023

 **RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**
KECAMATAN BUAHBATU KOTA BANDUNG TAHUN
2018 - 2023

Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah kelompok/kader/ lembaga yang mengikuti lomba tingkat kota	Kader/Klp	N/A	N/A	3	3	4	4
--	--	-----------	-----	-----	---	---	---	---

Kegiatan Pemberdayaan KUMKM Kewilayahan								
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan/Output	Satuan	Eksisting	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah kelompok/kader RW siaga	Usaha/Klp /Org	N/A	N/A	1	2	3	4

Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kewilayahan								
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan/Output	Satuan	Eksisting	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang Kecamatan	Orang	N/A	N/A	110	115	120	125

Sasaran

Program Prioritas

Kegiatan

Program Peningkatan Peran Kelembagaan, Masyarakat, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan									
Sasaran Program	Indikator Program	Formulasi Indikator	Satuan	Eksisting	Target				
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Kelurahan Unggul	Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	Persentase panjang drainase terpelihara terhadap jumlah panjang saluran drainase di Kelurahan	%	N/A	53,23	54,63	56,03	57,44	58,84

Program Prioritas

Kegiatan

Kegiatan Pemeliharaan RTH Kecamatan								
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan/Output	Satuan	Eksisting	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	luas RTH kecamatan terpelihara	m2	N/A	420	420	420	420	420

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan								
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan/Output	Satuan	Eksisting	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	Panjang Drainase terpelihara	meter	N/A	22.760	23.360	23.960	24.560	25.160

Kegiatan pengecatan Kerb bahu jalan								
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan/Output	Satuan	Eksisting	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023

 **RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**
KECAMATAN BUAHBATU KOTA BANDUNG

Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	Panjang kerb terpelihara	meter	N/A	700	700	700	700	700
--	--------------------------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Sasaran

Program Prioritas

Kegiatan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan										
Sasaran Program	Indikator Program	Formulasi Indikator	Satuan	Eksisting	Target					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Persentase Kelurahan Unggul	Cakupan pemeliharaan ketertarikan dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	Persentase jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	%	N/A	83,53	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan									
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan/ Output	Satuan	Eksisting	Target					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Cakupan pemeliharaan ketertarikan dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	RW	N/A	71	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial										
Sasaran Program	Indikator Program	Formulasi Indikator	Satuan	Eksisting	Target					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Persentase Kelurahan Unggul	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase jumlah Kelurahan ikut berperan aktif dalam mengikuti lomba tingkat kota	%	N/A	25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial									
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan/ Output	Satuan	Eksisting	Target					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Jumlah kelompok/ kader/ lembaga yang mengikuti lomba tingkat kota	Kader/ Klip	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sasaran

Program Prioritas

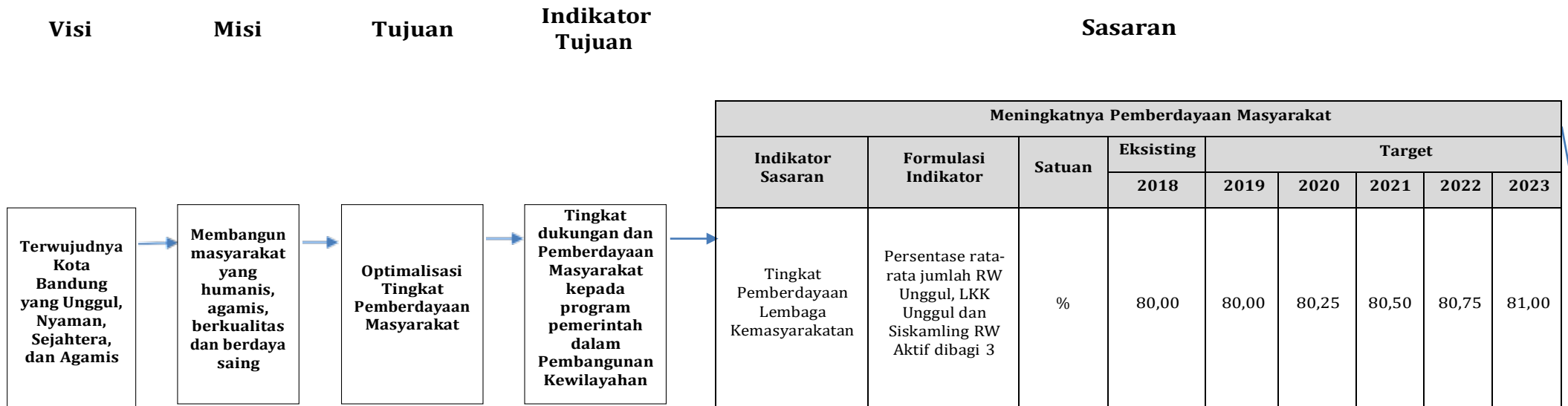
Kegiatan

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat										
Sasaran Program	Indikator Program	Formulasi Indikator	Satuan	Eksisting	Target					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Persentase Kelurahan Unggul	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase jumlah kader yang ikut aktif dalam kegiatan pemberdayaan di kewilayahan	%	N/A	50,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan										
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan/ Output	Satuan	Eksisting	Target						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif	Orang	N/A	90	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Program Pemberdayaan KUMKM										
Sasaran Program	Indikator Program	Formulasi Indikator	Satuan	Eksisting	Target					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Persentase Kelurahan Unggul	Persentase koperasi dan UKM aktif	Persentase jumlah koperasi ditempatkan tiap ibadah tiap Kelurahan terhadap jumlah Kelurahan Kelurahan	%	N/A	25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Kegiatan Pemberdayaan KUMKM Kewilayahan										
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan/ Output	Satuan	Eksisting	Target						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Persentase koperasi dan UKM aktif	Jumlah koperasi di tempat ibadah	Usaha /Kader / Klp	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Sasaran

Program Prioritas

Kegiatan

Program Pemberdayaan Kewilayahan									
Sasaran Program	Indikator Program	Formulasi Indikator	Satuan	Eksisting	Target				
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase rata-rata jumlah RW unggul, LKK unggul dan siskamling aktif	%	80,00	80,00	80,25	80,50	80,75	81,00

Program Prioritas

Kegiatan

Pemberdayaan lingkup RW								
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan/Output	Satuan	Eksisting	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup RW	Sub kegiatan	224	340	340	340	425	425

Pemberdayaan lingkup PKK								
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan/Output	Satuan	Eksisting	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023

 **RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**
KECAMATAN BUAHBATU KOTA BANDUNG TAHUN
2018 - 2023

Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup PKK	Sub kegiatan	21	24	24	24	24	24
--	---	-----------------	----	----	----	----	----	----

Program Prioritas

Kegiatan

Pemberdayaan lingkup Karang Taruna								
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan/Output	Satuan	Eksisting	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Sub kegiatan	22	30	30	30	30	30

Pemberdayaan lingkup LPM								
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan/Output	Satuan	Eksisting	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023

 **RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**
KECAMATAN BUAHBATU KOTA BANDUNG TAHUN
2018 - 2023

Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup LPM	Sub kegiatan	17	18	18	18	18	18
--	---	-----------------	----	----	----	----	----	----

5.1.1. Nilai-nilai Strategis Organisasi

Sebagai institusi yang merupakan bagian dari Pemerintah Kota Bandung, Kecamatan Buahbatu berpegang pada nilai-nilai yang terkandung di dalam visi Kota Bandung, yaitu mewujudkan kehidupan Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis. Yang merupakan perwujudan dari harapan warga Kota Bandung. Nilai-nilai tersebut dituangkan dalam bentuk keinginan untuk mewujudkan Kota Bandung dan kehidupan sosial warganya yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis.

Kecamatan Buahbatu secara khusus juga memiliki nilai-nilai yang merupakan kekhasan masyarakat di Kecamatan Buahbatu, yang mewarnai kekhasan karakteristik Pemerintah Kecamatan Buahbatu. Adapun nilai-nilai strategis organisasi Kecamatan Buahbatu tersebut adalah:

- a) *Profesional*, keseimbangan antara kesejahteraan di lingkungan aparatur Kecamatan Buahbatu serta upaya untuk mewujudkan kehidupan sosial yang kondusif di Kecamatan Buahbatu membutuhkan aparatur Kecamatan Buahbatu yang profesional.
- b) *Produktif*, adalah komitmen kuat dari organisasi Kecamatan Buahbatu untuk mewujudkan masyarakat Kecamatan Buahbatu yang produktif sejalan dengan meningkatnya produktivitas aparatur pemerintahan di lingkungan Kecamatan Buahbatu, untuk meningkatkan kesejahteraan.
- c) *Kondusif*, merupakan perwujudan dari upaya Kecamatan Buahbatu memenuhi keinginan dan harapan dari masyarakat Buahbatu agar tercipta kehidupan sosial yang kondusif.
- d) *Kokoh*, sinergi dan harmoni di lingkungan masyarakat di Kecamatan Buahbatu, adalah jaminan lancarnya keadilan pembangunan.

5.1.2. Faktor-faktor Kunci Keberhasilan

Keinginan untuk mewujudkan Kecamatan Buahbatu yang unggul melalui pelayanan prima dan pemberdayaan masyarakat, memerlukan komitmen yang kuat serta ditunjang oleh sikap dan perilaku profesional dan kehidupan sosial yang kondusif, dari aparat dan warga Kecamatan Buahbatu. Komitmen ini harus dipenuhi oleh faktor-faktor pendukung yang menjadi faktor-faktor kunci keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran.

Adapun faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut diantaranya adalah:

- a) Komitmen internal dan sinergi aparatur Pemerintah Kecamatan dan warga Kecamatan Buahbatu;
- b) Ketertiban dan keamanan di Kecamatan Buahbatu yang terjamin;
- c) Kepemimpinan Kecamatan Buahbatu yang ditunjang kemampuan manajerial yang unggul, dan mampu menjadi motivator dan dinamisator lingkungan kecamatan;
- d) Sumber Daya Manusia (pegawai) Kecamatan Buahbatu yang menjunjung profesionalisme, berkomitmen kuat terhadap tujuan organisasi serta memiliki dedikasi dan integritas tinggi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya;
- e) Kebijakan kecamatan yang terintegrasi dengan kebijakan kota, mampu menjamin kesinambungan program dan berbasis pada kebutuhan lokal;
- f) Adanya mekanisme dan standar kerja yang mampu memacu peningkatan kinerja setiap pegawai;

- g) Tersedianya prasarana dan sarana kantor yang dapat dimanfaatkan secara optimal dan terpelihara;
- h) Konsisten dan fokus pada ruang terbuka hijau, kawasan resapan air, pusat ekonomi, dan pemukiman.

52. Kebijakan Organisasi

Langkah selanjutnya, setelah penetapan tujuan dan sasaran, maka dalam perencanaan strategis operasional dibutuhkan kebijaksanaan atau cara untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Berbagai ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung, sebagai pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat untuk memperlancar dan menperpadukan setiap usaha untuk mencapai tujuan, sasaran serta visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya haruslah di tuangkan dalam bentuk kebijakan.

Dengan demikian maka arah makro kebijakan Kecamatan Buahbatu adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Buahbatu;
2. Kebijakan meningkatkan peran kelembagaan, masyarakat dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan di kewilayahan;
3. Kebijakan meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil analisa strategi dan arah kebijakan dalam percepatan tercapainya misi kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk di Kecamatan Buahbatu dapat dilihat di tabel dibawah ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, Dan Agamis			
Misi 2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan Buahbatu	1. Mengoptimalkan sistem manajemen mutu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Buahbatu
		2. Persentase temuan BPK dan Inspektorat yang di tindaklanjuti tepat waktu	
	2. Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	1. Meningkatnya peran serta kelembagaan dan masyarakat dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan	2. Meningkatkan peran kelembagaan, masyarakat dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan di kewilayahan
Misi 5 Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Optimalisasi tingkat pemberdayaan masyarakat	3. Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

BAB 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program Kegiatan Fasilitas Keuangan Kecamatan

Program kegiatan fasilitasi keuangan kecamatan meliputi revitalisasi, reaktualisasi, reorientasi dan refungsionerisasi kegiatan pembangunan dengan uraian sebagai berikut :

1. Pengembangan sumber daya manusia sebagai basis bagi upaya mendorong ekonomi kreatif, bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan.
2. Pelayanan prima kepada segenap warga serta mengkondisikan lingkungan dan kehidupan yang aman dan nyaman.
3. Peningkatan kinerja birokrasi kecamatan.
4. Penggabungan lintas sektoral dan vertikal dalam upaya optimalisasi daya dukung, pelayanan umum dan penumbuhan ekonomi kreatif.

Program dan Kegiatan Lintas SKPD dan Kebijakan

Secara umum, untuk program dan kegiatan lintas SKPD dapat dikelompokkan kedalam :

1. Program dan kegiatan yang langsung ditujukan untuk kepentingan masyarakat.
2. Program dan kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan kinerja aparat.
3. Program dan kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan publik.

Program dan Kegiatan

Berikut adalah program dan kegiatan pada Kecamatan Buahbatu Kota Bandung yang disusun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Buahbatu. Perencanaan program dan kegiatan ini sesuai alur atau mekanisme perencanaan, mulai dari Rakorbang hingga penetapan skala prioritas, antara lain secara umum sebagai berikut :

Rincian program dan kegiatan berdasarkan **Permendagri 13/2006 dan Permendagri 59/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2019 dengan Sebaran anggaran alokasi rata-rata belanja langsung Kecamatan Buahbatu sebesar **Rp.15.173.152.681,-** sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan diantaranya :
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional.
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor.
 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
 - Penyediaan alat tulis kantor.
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan.
 - Penyediaan makanan dan minuman.
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
 - Penyediaan jasa tenaga kerja pendukung administrasi

- perkantoran/ teknis perkantoran.
- Penyediaan jasa pengamanan kantor.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya :
 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
 - Pengadaan mebeulair.
 - Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.
 - Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas.
 - Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
 3. Program peningkatan disiplin aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya :
 - Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.
 - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya :
 - Pembinaan kinerja aparatur.
 5. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum yang meliputi kegiatan diantaranya :
 - Pemeliharaan RTH Kecamatan.
 - Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan.
 - Pengecatan Kerb bahu jalan.
 6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan yang meliputi kegiatan diantaranya :
 - Pengendalian keamanan lingkungan.
 7. Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial yang meliputi kegiatan diantaranya :
 - Peningkatan SDM kader kesejahteraan sosial.
 8. Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan yang meliputi kegiatan diantaranya :
 - Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan

kependudukan kewilayahan.

- Pembinaan RT RW.
9. Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat yang meliputi kegiatan diantaranya :
- Penguatan kelembagaan swadaya masyarakat kewilayahan.
10. Program Pemberdayaan KUMKM yang meliputi kegiatan diantaranya :
- Pemberdayaan KUMKM kewilayahan.
11. Program Pemberdayaan Kewilayahan yang meliputi kegiatan diantaranya :
- Pemberdayaan lingkup RW.
 - Pemberdayaan lingkup PKK.
 - Pemberdayaan lingkup Karang Taruna.
 - Pemberdayaan lingkup LPM.

Tahun Anggaran 2020 dengan Sebaran anggaran alokasi rata-rata belanja langsung Kecamatan Buahbatu sebesar **Rp.15.984.6-08.996,-** sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang meliputi kegiatan diantaranya :
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional.
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor.
 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
 - Penyediaan alat tulis kantor.
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

- Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan.
 - Penyediaan makanan dan minuman.
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
 - Penyediaan jasa tenaga kerja pendukung administrasi perkantoran/ teknis perkantoran.
 - Penyediaan jasa pengamanan kantor.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya :
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
 - Pengadaan mebeulair.
 - Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.
 - Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas.
 - Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya :
- Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.
 - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya :
- Pembinaan kinerja aparatur.
5. Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan yang meliputi kegiatan diantaranya :
- Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan kependudukan kewilayahan.
 - Pembinaan RT RW.
6. Program Peningkatan Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan yang meliputi kegiatan diantaranya :
- Pengendalian keamanan lingkungan.
 - Penguatan kelembagaan swadaya masyarakat kewilayahan.

- Peningkatan SDM kader kesejahteraan sosial.
 - Pemberdayaan KUMKM kewilayahan.
 - Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan.
7. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum yang meliputi kegiatan diantaranya :
- Pemeliharaan RTH Kecamatan.
 - Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan.
 - Pengecatan Kerb bahu jalan.
8. Program Pemberdayaan Kewilayahan yang meliputi kegiatan diantaranya :
- Pemberdayaan lingkup RW.
 - Pemberdayaan lingkup PKK.
 - Pemberdayaan lingkup Karang Taruna.
 - Pemberdayaan lingkup LPM.

Tahun Anggaran 2021 dengan Sebaran anggaran alokasi rata-rata belanja langsung Kecamatan Buahbatu sebesar **Rp.16.932.759.895,-** sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang meliputi kegiatan diantaranya :
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional.
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor.
 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
 - Penyediaan alat tulis kantor.
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan.
 - Penyediaan makanan dan minuman.
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
 - Penyediaan jasa tenaga kerja pendukung administrasi perkantoran/ teknis perkantoran.
 - Penyediaan jasa pengamanan kantor.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya :
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
 - Pengadaan mebeulair.
 - Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.
 - Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas.
 - Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya :
- Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.
 - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya :
- Pembinaan kinerja aparatur.
5. Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan yang meliputi kegiatan diantaranya :
- Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan kependudukan kewilayahan.
 - Pembinaan RT RW.
6. Program Peningkatan Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam

Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan yang meliputi kegiatan diantaranya :

- Pengendalian keamanan lingkungan.
- Penguatan kelembagaan swadaya masyarakat kewilayahan.
- Peningkatan SDM kader kesejahteraan sosial.
- Pemberdayaan KUMKM kewilayahan.
- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan.

7. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum yang meliputi kegiatan diantaranya :

- Pemeliharaan RTH Kecamatan.
- Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan.
- Pengecatan Kerb bahu jalan.

8. Program Pemberdayaan Kewilayahan yang meliputi kegiatan diantaranya :

- Pemberdayaan lingkup RW.
- Pemberdayaan lingkup PKK.
- Pemberdayaan lingkup Karang Taruna.
- Pemberdayaan lingkup LPM.

Tahun Anggaran 2022 dengan sebaran anggaran alokasi rata-rata belanja langsung Kecamatan Buahbatu sebesar **Rp.17.973.225.885,-** sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang meliputi kegiatan diantaranya :

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional.
- Penyediaan jasa kebersihan kantor.
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.

- Penyediaan alat tulis kantor.
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan.
 - Penyediaan makanan dan minuman.
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
 - Penyediaan jasa tenaga kerja pendukung administrasi perkantoran/ teknis perkantoran.
 - Penyediaan jasa pengamanan kantor.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya :
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
 - Pengadaan mebeulair.
 - Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.
 - Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas.
 - Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya :
- Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.
 - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya :
- Pembinaan kinerja aparatur.
5. Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan yang meliputi kegiatan diantaranya :

- Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan kependudukan kewilayahan.
 - Pembinaan RT RW.
6. Program Peningkatan Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan yang meliputi kegiatan diantaranya :
- Pengendalian keamanan lingkungan.
 - Penguatan kelembagaan swadaya masyarakat kewilayahan.
 - Peningkatan SDM kader kesejahteraan sosial.
 - Pemberdayaan KUMKM kewilayahan.
 - Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan.
7. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum yang meliputi kegiatan diantaranya :
- Pemeliharaan RTH Kecamatan.
 - Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan.
 - Pengecatan Kerb bahu jalan.
8. Program Pemberdayaan Kewilayahan yang meliputi kegiatan diantaranya :
- Pemberdayaan lingkup RW.
 - Pemberdayaan lingkup PKK.
 - Pemberdayaan lingkup Karang Taruna.
 - Pemberdayaan lingkup LPM.

Tahun Anggaran 2023 dengan sebaran anggaran alokasi rata-rata belanja langsung Kecamatan Buahbatu sebesar **Rp.19.115.238.473,-** sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang meliputi kegiatan diantaranya :
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional.
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor.
 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
 - Penyediaan alat tulis kantor.
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan.
 - Penyediaan makanan dan minuman.
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
 - Penyediaan jasa tenaga kerja pendukung administrasi perkantoran/ teknis perkantoran.
 - Penyediaan jasa pengamanan kantor.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya :
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
 - Pengadaan mebeulair.
 - Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.
 - Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas.
 - Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya :
- Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.
 - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya :

- Pembinaan kinerja aparatur.
5. Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan yang meliputi kegiatan diantaranya :
 - Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan kependudukan kewilayahan.
 - Pembinaan RT RW.
 6. Program Peningkatan Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan yang meliputi kegiatan diantaranya :
 - Pengendalian keamanan lingkungan.
 - Penguatan kelembagaan swadaya masyarakat kewilayahan.
 - Peningkatan SDM kader kesejahteraan sosial.
 - Pemberdayaan KUMKM kewilayahan.
 - Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan.
 7. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum yang meliputi kegiatan diantaranya :
 - Pemeliharaan RTH Kecamatan.
 - Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan.
 - Pengecatan Kerb bahu jalan.
 8. Program Pemberdayaan Kewilayahan yang meliputi kegiatan diantaranya :
 - Pemberdayaan lingkup RW.
 - Pemberdayaan lingkup PKK.
 - Pemberdayaan lingkup Karang Taruna.
 - Pemberdayaan lingkup LPM.

Tabel 6.1

Alokasi Anggaran Belanja Langsung 2019 - 2023

No	Kecamatan	Alokasi Anggaran (Rp) (dalam ribuan)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Buahbatu	15.173.152	15.984.608	16.932.759	17.973.225	19.115.238

**Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran dan Pendanaan Kecamatan Buahbatu Kota Bandung
Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target			Rp. (000,-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.05.3 1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100,00 %	100,00 %	2.260.735	100,00 %	2.366.029	100,00 %	2.602.632	100,00 %	2.862.895	100,00 %	3.149.184	100,00 %	13.131.677	Buahbatu	Kecamatan dan Kelurahan
		4.05.0 1.02	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan bulanan komunikasi, air dan listrik	12 laporan	12 laporan	198.555	12 laporan	218.411	12 laporan	240.252	12 laporan	264.277	12 laporan	290.705	12 laporan	1.348.645		
		4.05.0 1.06	Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perijinannya	105 unit	105 unit	61.133	105 unit	68.346	105 unit	75.180	105 unit	82.699	105 unit	90.968	105 unit	379.328		
		4.05.0 1.08	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa bulanan kebersihan kantor	12 jasa bulanan	12 jasa bulanan	186.960	12 jasa bulanan	205.656	12 jasa bulanan	226.221	12 jasa bulanan	248.843	12 jasa bulanan	273.728	12 jasa bulanan	1.141.409		
		4.05.0 1.09	Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah unit peralatan kerja yang diperbaiki terselesaikan	4 kegiatan	4 kegiatan	79.770	4 kegiatan	87.747	4 kegiatan	96.521	4 kegiatan	40.810	4 kegiatan	44.891	4 kegiatan	187.189		
		4.05.0 1.10	Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	Jumlah laporan penyediaan ATK	12 laporan	12 laporan	159.984	12 laporan	175.982	12 laporan	193.580	12 laporan	212.938	12 laporan	234.232	12 laporan	976.719		
		4.05.0 1.11	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang terealisasi	Jumlah laporan penyediaan cetkan dan penggandaan yang terealisasi	12 laporan	12 laporan	141.607	12 laporan	155.768	12 laporan	171.345	12 laporan	188.479	12 laporan	207.327	12 laporan	487.003		
		4.05.0 1.12	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan	Jumlah laporan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan	12 laporan	12 laporan	39.749	12 laporan	43.724	12 laporan	48.097	12 laporan	52.906	12 laporan	58.197	12 laporan	242.675		

**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN BUAHBATU KOTA BANDUNG
TAHUN 2018 - 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			penerangan bangunan kantor	bangunan kantor yang terealisasi																
		4.05.0 1.13	Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terealisasi	- laporan	4 laporan	12.561	4 laporan	13.817	4 laporan	15.199	4 laporan	16.719	4 laporan	18.391	4 laporan	76.689			
		4.05.0 1.14	Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga yang terealisasi	4 laporan	4 laporan	60.227	4 laporan	66.249	4 laporan	72.874	4 laporan	80.162	4 laporan	88.178	4 laporan	367.693			
		4.05.0 1.15	Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan yang terealisasi	15 jenie	15 jenie	36.321	15 jenie	39.953	15 jenie	43.948	15 jenie	48.343	15 jenie	53.177	15 jenie	221.744			
		4.05.0 1.17	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman yang terealisasi	12 laporan	12 laporan	292.990	12 laporan	322.289	12 laporan	354.518	12 laporan	389.970	12 laporan	428.967	12 laporan	1.788.736			
		4.05.0 1.18	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	4 laporan	4 laporan	160.000	4 laporan	176.000	4 laporan	193.600	4 laporan	212.960	4 laporan	234.256	4 laporan	976.816			
		4.05.0 1.19	Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran / teknis perkantoran	Jumlah laporan kegiatan pembayaran jasa tenaga pendukung	12 laporan	12 laporan	519.000	12 laporan	570.900	12 laporan	627.990	12 laporan	690.789	12 laporan	759.867	12 laporan	3.168.546			
		4.05.0 1.20	Kegiatan penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah jasa bulanan kegiatan penyediaan jasa pengamanan kantor	12 jasa bulanan	12 jasa bulanan	109.800	12 jasa bulanan	120.780	12 jasa bulanan	132.858	12 jasa bulanan	146.143	12 jasa bulanan	160.758	12 jasa bulanan	670.339			
		4.05.0 2	Program Peningkatan Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100,00 %	100,00 %	612.054	100,00 %	673.259	100,00 %	740.585	100,00 %	814.643	100,00 %	896.108	100,00 %	15.870.080	Buahbatu	Kecamatan dan Kelurahan	

**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN BUAHBATU KOTA BANDUNG
TAHUN 2018 - 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Prasarana Aparatur																
		4.05.0 2.07	Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis penyediaan perlengkapan gedung kantor	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
		4.05.0 2.10	Kegiatan pengadaan mebelair	Jumlah jenis pengadaan mebelair	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
		4.05.0 2.22	Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah unit bangunan terpelihara	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	100 %		
		4.05.0 2.24	Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara	100 %	100 %	416.604	100 %	458.264	100 %	504.090	100 %	554.499	100 %	609.949	100 %	2.543.409		
		4.05.0 2.42	pemeliharaan rutin/ berkala Gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	100 %	100 %	120.650	100 %	132.715	100 %	145.986	100 %	160.585	100 %	176.643	100 %	736.580		
		4.05.0 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100,00 %	100,00 %	28.100	100,00 %	28.100	100,00 %	28.100	100,00 %	28.100	100,00 %	28.100	100,00 %	140.500	Buahbatu	Kecamatan dan Kelurahan
		4.05.0 3.02	Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah jenis pakaian dinas beserta kelengkapannya	60 orang	60 orang	28.100	60 orang	28.100	60 orang	28.100	60 orang	28.100	60 orang	6028.100.000	60 orang	140.500		
		4.05.0 3.05	Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah jenis pakaian dinas hari-hari tertentu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4.05.0 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	-	100,00 %	172.500	100,00 %	189.750	100,00 %	208.725	100,00 %	229.597	100,00 %	252.557	100,00 %	1.053.129	Buahbatu	Kecamatan

 **RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**
KECAMATAN BUAHBATU KOTA BANDUNG
TAHUN 2018 - 2023

		4.05.0 5.04	Kegiatan pembinaan kinerja aparatur	Jumlah paket kegiatan pembinaan kinerja pegawai	-	100,00 %	172.500	100,00 %	189.750	100,00 %	208.725	100,00 %	229.597	100,00 %	252.557	100,00 %	1.053.129		
--	--	----------------	-------------------------------------	---	---	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	-----------	--	--

**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN BUAHBATU KOTA BANDUNG
TAHUN 2018 - 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat				Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Buahbatu															
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan Buahbatu			Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Buahbatu	80,00 -	80,00 -		80,50 -		81,00 -		82,00 -		83,00 -		83,00 -			
		2.06.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	75,00 -	75,00 -	1.721.696	80,00 -	1.893.866	81,00 -	2.083.252	82,00 -	2.291.578	84,00 -	10.511.129	83,00 -	15.958.016	Buahbatu	Kecamatan dan Kelurahan
		2.06.20.001	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan Kewilayahan	Daftar nominatif pelayanan lengkap	100,00 %	100,00 %	28.496	100,00 %	31.346	100,00 %	34.480	100,00 %	37.928	100,00 %	41.721	100,00 %	173.974		
		2.06.20.002	Kegiatan Pembinaan RT RW	Jumlah RT RW mendapat pembinaan	55 RW	55 RW	1.693.200	55 RW	1.862.520	55 RW	2.048.722	55 RW	2.253.649	55 RW	2.490.014	55 RW	10.337.155		
	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan			Persentase Kelurahan Unggul	-	50 %		50,00 %		75 %		75 %		100,00 %		100,00 %			
			Program Peningkatan Peran Kelembagaan, Masyarakat, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	N/A	N/A	N/A	75,00 %	2.650.991	76,00 %	2.916.090	77,00 %	3.207.699	78,00 %	3.528.469	78,00 %	12.303.249	Buahbatu	Kecamatan dan Kelurahan

 **RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**
KECAMATAN BUAHBATU KOTA BANDUNG
TAHUN 2018 - 2023

		1.05.1 5.005	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	44 RW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
--	--	-----------------	---	--	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN BUAHBATU KOTA BANDUNG
TAHUN 2018 - 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Peringkat Daerah			
						Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.07.2 5.005	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif	N/A	58,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1.06.3 3.001	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial	Jumlah kelompok/kader/ lembaga yang mengikuti lomba tingkat kota	N/A	-	-	3 kader / Klp	592.013	3 kader / Klp	651.214	4 kader / Klp	716.335	4 kader / Klp	787.969	4 kader / Klp	2.747.531		
		2.11.2 5.001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM Kewilayahan	Jumlah koperasi di tempat ibadah	N/A	-	-	3 usaha / Klp / Org	111.470	4 usaha / Klp / Org	122.617	5 usaha / Klp / Org	134.879	6 usaha / Klp / Org	148.367	6 usaha / Klp / Org	517.333		
		4.01.1 9.53	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kewilayahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	N/A	-	-	110 orang	20.485	115 orang	22.534	120 orang	24.787	125 orang	27.266	125 orang	95.071		
		1.03.4 2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	N/A	53,23 %	2.206.314	54,63 %	2.537.261	56,03 %	2.790.987	57,44 %	2.930.537	58,84 %	3.077.063	58,84 %	13.542.163	Buahbatu	Kecamatan dan Kelurahan
		1.03.4 2.015	Kegiatan Pemeliharaan RTH Kecamatan	Luas RTH Kecamatan terpelihara	280m ²	280 m ²	1.549.771	280 m ²	1.704.748	280 m ²	1.875.223	280 m ²	2.062.745	280 m ²	2.269.019	280 m ²	9.461.507		
		1.03.4 2.014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Panjang Drainase terpelihara	N/A	12 laporan	246.194	12 laporan	270.814	12 laporan	297.895	12 laporan	327.685	12 laporan	360.454	12 laporan	1.503.044		
		1.03.4 2.016	Kegiatan Pengecatan Kerb Bahu Jalan	Panjang kerb bahu jalan terpelihara	4620 m ²	4620 m ²	481.773	4620 m ²	529.950	4620 m ²	582.946	4620 m ²	641.240	4620 m ²	705.364	4620 m ²	2.941.276		


RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN BUAHBATU KOTA BANDUNG
TAHUN 2018 - 2023

		1.05.1 5	Program Peningkatan Keamanan dan	Cakupan Pemeliharaan ketentraman dan	N/A	55 %	1.391.817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Buahbatu	Kecamatan dan Kelurahan
--	--	-------------	----------------------------------	--------------------------------------	-----	------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------	-------------------------

**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN BUAHBATU KOTA BANDUNG
TAHUN 2018 - 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target			Rp. (000,-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Kenyamanan Lingkungan	keterlibatan masyarakat dan pencegahan tindak pidana															
		1.05.1 5.005	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	55 RW	55 RW	1.391.817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1.06.3 3	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	N/A	75 %	62.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Buahbatu	Kecamatan dan Kelurahan
		1.06.4. 05.26. 33.001	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial	Jumlah kelompok/kader/ lembaga yang mengikuti lomba tingkat kota	N/A	75	62.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2.07.2 5	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	N/A	58,33 %	349.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Buahbatu	Kecamatan dan Kelurahan
		2.07.2 5.005	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif	N/A	58,33	349.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2.11.2 5	Program Pemberdayaan KUMKM	Persentase koperasi dan UKM aktif	N/A	33,33 %	74.596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Buahbatu	Kelurahan
		2.11.2 5.001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM Kewilayahan	Jumlah koperasi di tempat ibadah	N/A	2 usaha / Klp / Org	74.596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

 **RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**
KECAMATAN BUAHBATU KOTA BANDUNG
TAHUN 2018 - 2023

Optim alisasi Tingk at Pembe rdayaa n				Tingkat dukungan dan pemberdayaan masyarakat kepada program pemerintah dalam															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN BUAHBATU KOTA BANDUNG
TAHUN 2018 - 2023**

Tujua n	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangka t Daerah Penangg ung- jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Masya rakat				pembangunan kewilayahan															
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat			Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan		75,00 %		76 %		77 %		78 %		79,00 %		80,00 %			
		2.07.2 5	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kewilayahan	82,14 %	80,00 %	10.286.120	80,25 %	12.425.000	80,50 %	14.550.000	80,75 %	16.675.000	81,00 %	18.800.000	81,00 %	72.736.120	Buahbatu	Kelurahan
		2.07.2 5.001	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	224 sub kegiatan	340 sub kegiatan	8.500.231	340 sub kegiatan	10.625.000	340 sub kegiatan	12.750.000	425 sub kegiatan	14.875.000	425 sub kegiatan	17.000.000	425 sub kegiatan	63.750.231		
		2.07.2 5.002	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	21 sub kegiatan	24 sub kegiatan	599.700	24 sub kegiatan	600.000	24 sub kegiatan	600.000	24 sub kegiatan	600.000	24 sub kegiatan	600.000	24 sub kegiatan	2.999.700		
		2.07.2 5.003	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	22 sub kegiatan	30 sub kegiatan	597.789	30 sub kegiatan	600.000	30 sub kegiatan	600.000	30 sub kegiatan	600.000	30 sub kegiatan	600.000	30 sub kegiatan	2.997.789		
		2.07.2 5.004	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	17 sub kegiatan	18 sub kegiatan	588.401	18 sub kegiatan	600.000	18 sub kegiatan	600.000	18 sub kegiatan	600.000	18 sub kegiatan	600.000	18 sub kegiatan	2.988.401		
				TOTAL			20.949.048		33.699.034		27.416.560		30.543.645		33.752.935		146.286.625		

BAB 7

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas



Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Kinerja menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan

dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir masa jabatan, yang ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan

daerah setiap tahun atau indikator capaian bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan, setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Buahbatu Kota Bandung menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Organisasi Pemerintah Daerah dengan pemerintah, dan OPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen Laporan Kinerja (LKjIP) tahunan dan LKjIP lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Indikator Kinerja Kecamatan Buahbatu Kota Bandung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Buahbatu untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Buahbatu Kota Bandung yaitu :

1. Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Buahbatu;
2. Persentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu
3. Persentase Kelurahan Unggul;

4. Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Buahbatu Kota Bandung dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2019 - 2023 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Kecamatan Buahbatu yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Buahbatu	80,00 -	75,00 -	80,00 -	81,00 -	82,00 -	84,00 -
2	Persentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
3	Persentase Kelurahan Unggul	N/A	50 %	50,00 %	75 %	75 %	100,00 %
4	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	N/A	76 %	77 %	78 %	79 %	80 %

7.1 Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Buahbatu

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik menjelaskan definisi dan beberapa unsur penilaian SKM diantaranya :

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).

Unsur SKM dalam peraturan ini meliputi:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif *)

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Standar Pelayanan Publik

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi pelayanan dan/atau penerima pelayanan. Standar Pelayanan Publik, menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, sekurang-kurangnya meliputi:

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) yaitu :

1. Persyaratan
2. Sistem, mekanisme dan Prosedur
3. Jangka Waktu Pelayanan
4. Tarif/Biaya
5. Produk Pelayanan
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) yaitu :

1. Dasar Hukum
2. Sarana dan Prasarana/Fasilitas
3. Kompetensi Pelaksana
4. Pengawasan Internal
5. Jumlah Pelaksana
6. Jaminan Pelayanan
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana

72 Persentase Kelurahan Unggul

Untuk mencapai target dan sasaran pembangunan Kota Bandung berdasarkan RPJMD tahun 2018 - 2023 dan memperhatikan peluang serta tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2023, peran serta kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan dapat dijadikan indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Kiaracondong.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Pengukuran indikator kinerja dari sasaran strategis meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan berdasarkan RPJMD tahun 2018 - 2023 adalah Persentase Kelurahan Unggul, dimana dalam rangka mewujudkan janji Wali Kota dan pelimpahan kewenangan kepada Kecamatan dengan kriteria Kelurahan Unggul yaitu memenuhi/melaksanakan minimal 5 dari 12 jenis kondisi sebagai berikut :

1. Terbentuknya satwankar Kelurahan (Tramtib)
 - Ada kepengurusan
 - Ada program kerja
 - Mengikuti pelatihan
 - Melakukan pemadaman dini bila terjadi kebakaran sebelum pemadam kebakaran datang
 - Melakukan penyuluhan /motivasi kepada masyarakat
2. Terbentuknya Kampung siaga Bencana (Kagana)
 - Ada kepengurusan
 - Gardu Sosial
 - Lumbung sosial
 - Peta Rawan Bencana
 - Melakukan penyuluhan kepada masyarakat kesiapsiagaan bencana
3. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos)
 - Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca

- Memiliki koleksi buku ≥ 30 exp
- Koran2 / majalah langganan Kelurahan
- Ada laporan pengunjung
- 4. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah
 - petunjuk arah ke masjid
 - ada Peningat/alrm waktu sholat
- 5. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat Kelurahan (PM)
 - SK / SP
 - Ada Program Kerja
 - Monitoring Rawan Jentik
 - Melaksanakan penyuluhan/himbauan per-minggu
 - Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)
- 6. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per Kelurahan (PM)
 - Data terpilah
 - satgas Pengarusutamaan gender (PUG)
 - Pelatihan pelatihan
 - Perlindungan bagi perempuan (KDRT)
- 7. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM)
 - Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK
 - Memiliki data anak
 - Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA
 - Monitoring dan evaluasi
- 8. Septic Tank Komunal (Ekbang)
 - Minimal untuk 5 rumah
 - Jarak dengan sumber air bersih ≥ 11 meter
 - Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga
 - Menggunakan pipa paralon
 - Menggunakan bak kontrol
- 9. Bank sampah per kelurahan (Ekbang)
- 10. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2019) (Ekbang)
 - Anggota Koperasi ≥ 20 orang

- Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas
 - Memiliki Akte Pendirian
 - Ada usaha simpan pinjam
11. Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang)
- Kriteria:
- a. Kerb terpelihara tidak ada rumput pada nat/ dicat warna hitam putih tidak pudar setiap triwulan
 - b. Jalan terpelihara/tidak ada rumput liar dan sampah setiap triwulan
 - c. Pada saluran air/kali tidak ada gulma, sedimen dan sampah yang mencolok setiap triwulan
 - d. Tidak ada sumbatan air dibawah jembatan yang disebabkan ambias
 - e. Taman RW dalam kondisi bersih tidak ada sampah dan tidak ada tumbuhan liar serta memotong daun atau ranting kering
 - f. Melakukan penyiraman pada musim kemarau
12. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)
- Ada Pengurus
 - Ada Anggota
 - Ada AD/ART

73 Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 281 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung. Pemberdayaan Kewilayahan dalam keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran atau dalam bentuk materiil.

Pengukuran indikator kinerja sasaran meliputi jumlah sub kegiatan yang ada dalam jenis kegiatan dalam PIPPK berbasis Pemberdayaan Komunitas Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW;

- b. Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK;
- c. Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
- d. Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM

Sasaran strategis meningkatnya pemberdayaan masyarakat berdasarkan RPJMD tahun 2018 - 2023 adalah Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , merupakan salah satu indikator kinerja atau perjanjian kinerja karena merupakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dengan kriteria persentase rata-rata RW Unggul ditambah LKK Unggul dan Siskamling RW Aktif. Kriteria RW Unggul yaitu Metode Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dan 7 dari 16 Kriteria RW Unggul sebagai berikut :

Salah satu dari metode pengelolaan sampah berbasis Masyarakat:

1. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola komposter skala rumah tangga
2. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola bank sampah
3. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola salah satu metode 3 R
4. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola biodigester
5. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola sampah dengan metode lainnya selain pengangkutan sampah dari rumah ke TPS

Kriteria RW Unggul terdiri dari 16 jenis kondisi dibawah ini :

1. Satu Kampung Satu Taman Bermain;
2. Balai RW/Markas Karang Taruna;
3. Sanggar seni Sunda (Jaipongan/Kecapi Suling, perguruan silat, Rebana/Tagoni dll);
4. Biopori/Sumur resapan tiap rumah dan jalan/gang;
5. Gapura Kujang;
6. Satu Kampung Satu Produk;
7. Kampung Berkebun;
8. Kampung Caang Baranang;

9. MCK komunal;
10. Pavingisasi;
11. Gerakan satu rumah satu tanaman;
12. Movie on the move (Layar tancep)/Nonton Bareng;
13. Media Kampanye Kampung Unggul;
14. Satu Rumah satu jumantik;
15. Laporan RW tepat waktu minimal form A :
 - a. Laporan Kependudukan (Format A1-A5)
 - b. Laporan Program KangPisMan sampah di wilayah RW (Format B dan C)
 - c. Usulan Aspirasi Masyarakat dan Potensi Swadaya Murni
16. RW berdaya
 - Ada kepengurusan
 - Ada kegiatan pengumpulan ziswa (Zakat, Infak, Shodakoh dan Wakaf)
 - Adanya kegiatan sosial yang dibiayai hasil ziswa (zakat, infak, shodakoh dan wakaf)

Kriteria LKK Aktif :

1. Seluruh Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan/Kelurahan mempunyai rencana/ agenda/program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup LKK (Kecamatan/Kelurahan)
2. Minimal 60% Ketua / Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan hadir dalam pembahasan musrenbang Kecamatan
3. Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan melaksanakan minimal 75% dari seluruh agenda/program kerja yang direncanakan pada tahun berjalan
4. Aktif mengikuti kegiatan / lomba/kejuaraan di tingkat Kota minimal 2 kegiatan dalam satu tahun

Kriteria Siskamling Aktif :

1. Adanya Pengurus
2. Adanya Kelompok Siskamling
3. Adanya Jadwal Siskamling
4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling
5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)

BAB 8

PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Buahbatu sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Bandung, maka Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Buahbatu ini merupakan dokumen perencanaan bidang/urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Urusan Sosial, Urusan Pengadministrasian Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan, Urusan Pemberdayaan Kewilayahan, Urusan Pemberdayaan Kewilayahan lingkup Infrastruktur dan Lingkungan, serta Urusan Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Urusan Sosial, Urusan Pengadministrasian Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan, Urusan Pemberdayaan Kewilayahan, Urusan Pemberdayaan Kewilayahan lingkup Infrastruktur dan Lingkungan, serta Urusan Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat yang di ampu oleh Kecamatan Buahbatu dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kota Bandung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kota Bandung tahun 2018 - 2023.

Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Strategis (Renstra) ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di kota Bandung Provinsi Jawa Barat.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Buahbatu ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Kecamatan Buahbatu.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Kecamatan Buahbatu merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Urusan Sosial, Urusan Pengadministrasian Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan, Urusan Pemberdayaan Kewilayahan, Urusan Pemberdayaan Kewilayahan lingkup Infrastruktur dan Lingkungan, serta Urusan Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat yang di ampu oleh Kecamatan Buahbatu dan atau target kinerja sasaran Kecamatan Buahbatu.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Buahbatu yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Kecamatan Buahbatu harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Kecamatan Buahbatu. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Kecamatan Buahbatu di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Buahbatu ini.

Bandung, Juli 2019

**CAMAT BUAHBATU
KOTA BANDUNG**



Drs. DENNY SANY, M. Si

NIP. 19650810 198603 1 024